



BAHAN AJAR (HANJAR)

SEJARAH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

SEJARAH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Penyusun:

Tim Pokja lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
2. Kombes Pol Drs. Bambang Suminto, S.H., M.H.
3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
4. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
5. AKBP I Nyoman Tika, S.Ag., S.H., M.H.
6. AKBP Edi Purnawan S.Pd., M.M
7. AKP Suntawi, S.Pd., M.M.
8. AKP ANDIKA ADI PRADANA, S.IK., MM.
9. Briptu Aries Adi Susanto

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Identitas Buku	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi	1
MODUL 1 SEJARAH KEPOLISIAN INDONESIA	2
Pengantar	2
Kompetensi Dasar	2
Materi Pelajaran	3
Metode Pembelajaran	4
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	5
Kegiatan Pembelajaran	5
Tagihan/Tugas	6
Lembar Kegiatan	6
Bahan Bacaan	8
POKOK BAHASAN I	
1. Sejarah Kepolisian pada Zaman Kerajaan Majapahit...	8
2. Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Belanda .	11
3. Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang...	12
4. Sejarah Terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	13

5. Sejarah dan Nilai-nilai Perjuangan Kepolisian Negara Dalam Menghadapi Tentara Jepang	15
6. Sejarah Kepolisian menghadapi tentara sekutu dan Belanda	16
7. Sejarah Kepolisian dalam Menanggulangi Peristiwa 3 Juli 1946	18
8. Sejarah Kepolisian dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda tahap I (21 Juli 1947).....	18
9. Sejarah Kepolisian dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda tahap II	20
10. Menjelaskan sejarah Kepolisian dalam terbentuknya Polisi Wanita	21

POKOK BAHASAN II

1. Peran Moehammad Jasin dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia	23
2. Sebagai komandan MBB Jatim dalam Penumpasan PKI Madiun 1948.....	27
Rangkuman	30
Latihan	31

MODUL	2	MASA DEMOKRASI PARLEMENTER/LIBERAL DAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN	32
		Pengantar	32
		Kompetensi Dasar	32
		Materi Pelajaran	33
		Metode Pembelajaran	33
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	34
		Kegiatan Pembelajaran	34
		Tagihan/Tugas	35
		Lembar Kegiatan	36

	Bahan Bacaan	37
	1. Sejarah Polri pada Penumpasan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)	37
	2. Sejarah Polri pada Penumpasan Gerakan Andi Azis ...	38
	3. Sejarah Polri pada Penumpasan Gerakan DI/TII	39
	4. Sejarah Polri pada Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).	41
	5. Sejarah Polri pada Penumpasan PRRI/Permesta	41
	6. Sejarah Polri pada Masa Operasi Trikora	46
	7. Sejarah Polri pada Masa Pertempuran-pertempuran dengan Pihak Belanda	47
	8. Sejarah Polri pada Masa Operasi Dwikora	52
	Rangkuman	54
	Latihan	55
MODUL	3 INTEGRITAS POLRI KEDALAM ABRI DAN MASA ORDE BARU	56
	Pengantar	56
	Kompetensi Dasar	56
	Materi Pelajaran	57
	Metode Pembelajaran	57
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	58
	Kegiatan Pembelajaran	58
	Tagihan/Tugas	59
	Lembar Kegiatan	59
	Bahan Bacaan	60
	1. Sejarah Integritas Polri ke dalam ABRI	60

	2. Sejarah Polri pada Masa Penumpasan G30S/PKI di Jakarta.....	61
	3. Sejarah Polri pada masa Penumpasan PKI di Jawa Tengah	64
	4. Sejarah Polri pada Masa Penumpasan PKI di Luar Jawa	66
	Rangkuman	67
	Latihan	68
MODUL	4 SEJARAH POLRI PADA MASA ERA REFORMASI DAN POLRI MANDIRI	69
	Pengantar	69
	Kompetensi Dasar	69
	Materi Pelajaran	69
	Metode Pembelajaran	70
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	70
	Kegiatan Pembelajaran	71
	Tagihan/Tugas	72
	Lembar Kegiatan	72
	Bahan Bacaan	73
	1. Sejarah Polri pada Masa Era Reformasi	73
	2. Sejarah Polri Pada Masa Polri Mandiri.....	76
	3. Pemekaran Polda dan Polres.....	83
	4. hubungan Polri Terhadap TNI dan Pemda dalam membangun bangsa.....	87
	Rangkuman	89
	Latihan	90

HANJAR**SEJARAH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA****10 JP (450 menit)****PENDAHULUAN**

Berpisahnya institusi Polri dari TNI, tentunya membawa implikasi-implikasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di sisi lain Polri lebih bisa mandiri dan berkonsentrasi melaksanakan tugas pokoknya, tetapi di sisi lain kalau kita perhatikan di lapangan masih terdapat anggota yang sudah mulai luntur semangat juangnya sehingga cenderung asal-asalan dalam melaksanakan tugas. Padahal semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini maka semakin berkembang pula tantangan tugas di lapangan.

Agar bisa menghadapi tantangan tugas yang semakin berat sebagaimana tersebut diatas, maka sangat diperlukan personel-personel yang profesional dan mempunyai disiplin serta semangat juang yang tinggi.

Untuk menumbuhkan dan memupuk semangat juang di sanubari seluruh anggota Polri, maka dalam naskah sekolah ini akan diuraikan mengenai : sejarah Polri mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, sejarah terpisahnya Polri dengan TNI, keberhasilan-keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas.

**STANDAR KOMPETENSI**

Memahami sejarah perjuangan Polri untuk menumbuhkan jiwa kejuangan.

Modul
01

SEJARAH KEPOLISIAN INDONESIA


2 JP (90 Menit)


PENGANTAR

Dalam bahan ajar ini dibahas tentang sejarah kepolisian pada zaman Kerajaan Majapahit, sejarah kepolisian pada zaman penjajahan Belanda, sejarah kepolisian pada zaman penjajahan Jepang, sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejarah dan nilai-nilai kejuangan Kepolisian Negara dalam menghadapi tentara Jepang, sejarah Kepolisian menghadapi tentara sekutu dan Belanda, sejarah kepolisian dalam menanggulangi peristiwa 3 juli 1946, sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap I (21 Juli 1947), sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap II, peran M.Jasin dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dan komandan Mobile Brigade Besar (MBB) Jatim dalam penumpasan PKI Madiun 1948.

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahamisejarah dan nilai-nilai kejuangan Polri sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan dan sejarah pahlawan nasional M.Jasin.




KOMPETENSI DASAR

1. Memahami sejarah kejuangan Polri sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan.


Indikator hasil belajar:


- a. Menjelaskan sejarah Kepolisian pada zaman Kerajaan Majapahit;
- b. Menjelaskan sejarah Kepolisian pada zaman penjajahan Belanda;
- c. Menjelaskan sejarah Kepolisian pada zaman penjajahan Jepang;
- d. Menjelaskan sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Menjelaskan sejarah dan nilai-nilai kejuangan Kepolisian Negara dalam menghadapi tentara Jepang;
- f. Menjelaskan sejarah Kepolisian menghadapi tentara sekutu


	<p>dan Belanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Menjelaskan sejarah Kepolisian dalam menanggulangi peristiwa 3 juli 1946; h. Menjelaskan sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap I (21 Juli 1947); i. Menjelaskan sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap II; j. Menjelaskan sejarah Kepolisian dalam terbentuknya Polisi Wanita. <p>2. Memahami sejarah pahlawan nasional M.Jasin.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan peran M.Jasin dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia; b. Menjelaskan komandan Mobile Brigade Besar (MBB) Jatim dalam penumpasan PKI Madiun 1948.
--	--

	<p>MATERI PELAJARAN</p>
	<p>1. Pokok bahasan:</p> <p>Sejarah kejuangan Polri sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan.</p> <p>Subpokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah Kepolisian pada zaman kerajaan Majapahit; b. Sejarah Kepolisian pada zaman penjajahan Belanda; c. Sejarah Kepolisian pada zaman penjajahan Jepang; d. Sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Sejarah dan nilai-nilai kejuangan Kepolisian Negara dalam menghadapi tentara Jepang; f. Sejarah Kepolisian menghadapi tentara sekutu dan Belanda; g. Sejarah Kepolisian dalam menanggulangi peristiwa 3 juli 1946; h. Sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap I (21 Juli 1947); i. Sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap II. j. Sejarah Kepolisian dalam pembentukan Polisi Wanita.


	<p>2. Pokok bahasan:</p> <p>Sejarah pahlawan nasional M.Jasin.</p> <p>Sub pokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peran M.Jasin dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia; Komandan MBB jatim dalam penumpasan PKI Madiun 1948.
--	---


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Metode ceramah</p> <p>Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang sejarah dan nilai-nilai kejuangan Polri sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan dan sejarah pahlawan nasional M.Jasin.</p>
	<p>2. Metode tanya jawab</p> <p>Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan.</p>
	<p>3. Metode game dengan EL (<i>Experiential Learning</i>)</p> <p>Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai, inspirasi dan terobosan dalam kegiatan terstruktur.</p>
	<p>4. Metode NLP (<i>Neuro Linguistic Programming</i>)</p> <p>Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (<i>neuro</i>) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (<i>linguistic</i>) yang dilakukan secara berulang-ulang (<i>programming</i>).</p>
	<p>5. Metode diskusi</p> <p>Metode ini digunakan untuk mendiskusikan tentang sejarah dan nilai-nilai kejuangan Polri sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan dan sejarah pahlawan nasional M.Jasin.</p>
	<p>6. Metode penugasan</p> <p>Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang diberikan.</p>

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>; b. Laptop; c. <i>LCD</i>; d. Video; e. Peta wilayah. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas Flipchart; b. Alat tulis. 3. Sumber belajar:


	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Perkenalan; c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi sejarah kejuangan Polri sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan serta sejarah pahlawan nasional M.Jasin; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik menayangkan video yang telah disiapkan; d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; e. Pendidik membagi peserta didik menjadi 10 kelompok diawali dengan bernyanyi; f. Pendidik mengawasi jalannya diskusi; g. Masing-masing ketua kelompok memaparkan hasil diskusi

	<p>kelompok dan ditanggapi kelompok lainnya;</p> <p>h. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi dari masing-masing kelompok.</p> <p>3. Tahap akhir: 10 Menit</p> <p>a. penguatan materi</p> <p>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi</p> <p>Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas</p> <p>Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</p>
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> Pendidik menugaskan peserta didik meresmikan materi yang telah diberikan. Pendidik memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok mendiskusikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> Pok 1 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah kepolisian pada zaman kerajaan Majapahit. Pok 2 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah kepolisian pada zaman penjajahan Belanda. Pok 3 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah kepolisian pada zaman penjajahan Jepang. Pok 4 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pok 5 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah dan nilai-nilai perjuangan Kepolisian Negara dalam menghadapi tentara Jepang.

	<ul style="list-style-type: none">f. Pok 6 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah kepolisian menghadapi tentara sekutu dan Belanda.g. Pok 7 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah kepolisian dalam menanggulangi peristiwa 3 juli 1946.h. Pok 8 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap I (21 Juli 1947).i. Pok 9 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap II.j. Pok 10 membahas tentang Sejarah Kepolisian dalam pembentukan Polisi Wanita.
--	--

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN I</p> <p style="text-align: center;">SEJARAH SINGKAT KEPOLISIAN DI INDONESIA</p> <p>1. Sejarah Kepolisian pada Zaman Kerajaan Majapahit</p> <p>Dalam sistem pengangkatan Raja di pulau Jawa, rakyat Jawa sangat patuh terhadap adat kebiasaan leluhurnya yaitu seorang Raja haruslah keturunan dari Raja, walaupun pada kenyataan ada Raja yang akan dinobatkan belum cukup umur atau cacat fisik, sehingga tidak mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan pemerintahan kerajaan. Keadaan demikian ini mengakibatkan timbulnya kekecewaan-kekecewaan dikalangan keluarga Raja yang lain, maupun yang iri hati, kemudian menimbulkan kekacauan-kekacauan di wilayah kerajaan atau usaha untuk merebut tahta kerajaan yang diduduki oleh Raja.</p> <p>Faktor kelemahan Raja pada masa pemerintahan Jayanegara mengakibatkan banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan, bahkan berkembang menjadi pemberontakan di wilayah Majapahit. Pemberontakan yang paling membahayakan keselamatan Raja adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Ra Kuti tahun 1319. Namun berkat bantuan 15 (lima belas) pengawal Pribadi Raja, yaitu Pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada, Raja dapat diloloskan dan diungsikan kesuatu tempat yang aman yaitu di Desa Bedander. Dalam pengungsian tersebut Gajah Mada tidak mengijinkan anggota pasukannya meninggalkan tempat pengungsian, hal ini dikhawatirkan apabila ada anggota pasukannya yang keluar dari tempat persembunyian tersebut akan menjadi penyebab diketahuinya tempat persembunyian Raja Jayanegara.</p> <p>Pada waktu Gajah Mada bersama pasukan Bhayangkara mengungsikan Raja Jayanegara di Desa Bedander inilah Gajah Mada memberikan amanat untuk ditaati dan dijalankan oleh anggota Bhayangkara yang dipimpinnya.</p> <p>a. Adapun amanat dari Gajah Mada yang ditekankan kepada para anggota pasukan Bhayangkara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Supaya Pasukan Bhayangkara <i>Satya Haprabu</i>. <p>Sikap setia pada kerajaan dan Raja, karena Raja merupakan penjelmaan Tuhan di dunia, sehingga apabila setia dan patuh kepada rajanya, berarti setia dan patuh terhadap Tuhannya. Karena itu apa yang dikatakan oleh Raja ini berarti sama dengan perintah Tuhan yang harus dipatuhi.</p>

	<p>2) Supaya Pasukan Bhayangkara <i>Hanyaken Musuh</i>.</p> <p>Tindakan untuk selalu melenyapkan musuh, baik musuh kerajaan maupun musuh masyarakat, karena pada waktu itu ada anggota Sapta Dharma Putra yang ingin membunuh Raja dan ingin merebut tahta kerajaan serta dikhawatirkan akan ada sekelompok pengganggu ketentraman Kerajaan.</p> <p>3) Supaya Pasukan Bhayangkara <i>Gineung Pratidina</i>.</p> <p>Suatu tekad mempertahankan kerajaan yang pada waktu itu Raja Jayanegara meloloskan diri dari ibu kota Kerajaan Majapahit beserta pengawalnya, maka oleh Gajah Mada ditimbulkanlah semangat lagi untuk meningkatkan kualitas pengabdian, untuk mempertahankan kerajaan dan merebut kembali Kerajaan Majapahit dari Ra Kuti yang telah menduduki Tahta Kerajaan dengan cara licik.</p> <p>4) Supaya Pasukan Bhayangkara <i>Tan Satriksna</i>.</p> <p>Ini merupakan sikap yang muncul dari hati nurani yang ikhlas tanpa pamrih, tidak terikat sesuatu atau hadiah. Hal ini disampaikan kepada anggota pasukan Bhayangkara, karena pada saat Gajah Mada keluar dari persembunyian di desa Bedander, pergi ke ibu kota dengan menyamar sebagai rakyat jelata yang ingin mencari tahu dari rakyat Majapahit tentang sikap dan perasaan cinta Raja Jayanegara. Dalam penyamaran itulah Gajah Mada mengetahui bahwa Ra Kuti mengadakan sayembara bahwa siapa saja yang dapat menunjukan dimana Jayanegara berada, akan diberi hadiah satu pundi-pundi berisi uang emas.</p> <p>Tugas lain yang dibebankan kepada pasukan Bhayangkara yang dipimpinnya adalah melaksanakan pemeliharaan rasa aman dan tentram yang dapat dirasakan oleh rakyat. Berkat pemeliharaan ketertiban dan ketentraman Negara pada masa itu dapat menjamin keamanan jiwa, raga, harta dan benda, karena tindakan yang tegas dan disiplin tinggi para anggotanya dalam setiap melaksanakan tugas, maka pasukan Bhayangkara sangat disegani dan ditakuti oleh kawan maupun lawannya.</p> <p>Selain mengamankan Raja, juga bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman, pengawasan dipasar-pasar, pusat perdagangan, di pantai dan pelabuhan, di jalan serta di tempat umum lainnya. Yang diawasi dalam perdagangan dipasar-pasar diantaranya soal cukai, ukuran, takaran dan timbangan dan juga menjalankan pengadilan, kesusilaan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan. Peraturan-peraturan dikeluarkan berkaitan dengan pemberian kepada Pegawai, Lembaga Agama, mengenai perlindungan,</p>
--	--

	<p>pengusahaan, pemilikan tanah dan hak-hak perburuhan. Kebanyakan dari peraturan-peraturan ini dipikirkan dan disusun oleh Gajah Mada sendiri.</p> <p>b. Perlu diketahui bahwa Kerajaan Majapahit sudah mempunyai beberapa Lembaga Pemerintahan sebagai kelengkapan untuk membantu Raja melaksanakan pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sapta Dharma Putra. Sapta Dharma Putra disebut juga Bhatara Sapta Prabu. Anggota anggotanya terdiri dari : Nenek Raja, Paman Raja, Saudara dari Ayah atau Ibu Raja yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Tugasnya memberikan saran, pertimbangan, nasehat kepada Raja dalam menentukan politik kenegaraan dan pemerintahan serta dalam pengambilan keputusan penting lainnya. 2) Bhayangkara. Bhayangkara mempunyai anggota prajurit-prajurit pilihan. Pada awal pembentukannya terdiri dari 15 (lima belas) orang yang dikepalai oleh Bekel Gajah Mada. Adapun tugasnya menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal pribadi Raja dan Negara Majapahit, yang kemudian dalam perkembangannya, Bhayangkara mengembantugas menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan. 3) Ratu Angabaya. Pejabat ini bertugas sebagai penguasa pemerintahan apabila Negara dalam keadaan bahaya (diangkat secara luar biasa). 4) Jalanidi. Pejabat ini bertugas mengumumkan dan menegakan kedaulatan Negara diluar dan juga sebagai pasukan dilaut, merangkap Polisi Laut, dikepali oleh Laksamana Nala. Anggotanya dipilih daripada pelaut dan pedagang di laut serta para nelayan. <p>c. Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dalam sejarah pada Zaman kerajaan Majapahit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melindungi dan mengayomi dari usaha-usah yang meresahkan dan mengancam keamanan serta ketertiban umum;
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Adanya sikap ketaatan kepada Tuhan dan patuh kepada rajanya; 3) Adanya semangat untuk melindungi dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar kerajaan; 4) Adanya suatu tekad dan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas pengabdianya kepada kerajaannya; 5) Memiliki sikap tanpa pamrih. <p>2. Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Belanda</p> <p>Awal pemerintahan Hindia Belanda sebuah komisi untuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan <i>Politie&Justitiewezen</i> komisi terdiri dari tiga orang yaitu : Mr. Muntings, Mr. Maurisse dan Mr. Markus pada tanggal 8 April 1817 untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan peradilan, komisi tersebut menganjurkan supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pokrol Jenderal (Jaksa Agung) pada <i>Hooggerechtshof</i> (makamah Agung Hindia Belanda) dijadikan kepala Polisi Kehakiman, tetapi diberi wewenang memimpin Kepolisian umum yang disalurkan lewat residen, dalam pelaksanaan tugas ia dibantu oleh para residen dan opsir <i>Justitie</i>. b. <i>Administrative Politie</i>, disamping adanya <i>Justitiele Politie</i>, ditugaskan pula residen atau Kepala pemerintahan tradisional, sesuai dengan ketentuan yang dibuat tentang hubungan antara administrative dan <i>Justitie Politie</i>. <p>Sebagai hasil dari kerja komisi tersebut, keluarlah <i>profisionell Reglement op de Criminele Rechts Vordering bij het Hooggerechshof ende Raden Van Justitie</i> untuk orang Eropa, dan <i>Regleent op de Administratie Der Politie en de Crimineele en civiele Rechsvordering onder den Inlander in Nederlandsch Indie</i> untuk orang bumi putra pada tanggal 10 Januari 1619. Bentuk-bentuk Kepolisian pada zaman ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Polisi Umum (<i>Algemene Politie</i>); Polisi Umum secara administratif merupakan bagian dari Departemen Binnenlands Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Badan ini menyelenggarakan urusan pegawai, perlengkapan, persenjataan, pendidikan dan latihan-latihan kesatuan. Tetapi departemen ini tidak berhak mencampuri pelaksanaan operasional. b. Polisi Kota (<i>stades politie</i>); Pada tahun 1911 diteapkan untuk mengadakan reorganisasi Kepolisian, kemudian tahun 1914 diadakan perubahan
--	--

	<p>terhadap reorganisasi sebelumnya sehingga mendapatkan dasar-dasar susunan dari Polisi Kota. Reorganisasi mula-mula ditunjukkan pada kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya.</p> <p>c. Polisi Bersenjata (<i>Gewapende Politie</i>);</p> <p>Pada tahun 1912 dibentuk Polisi Bersenjata kemudian dijadikan sebagai alat kekuasaan sipil pemerintahan Hindia Belanda di daerah-daerah.</p> <p>d. Polisi Lapangan (<i>VeledPolitie</i>);</p> <p>Polisi Lapangan dibentuk tahun 1920 sebagai pasukan pilihan dari Polisi Umum. Polisi Lapangan ini menggantikan Polisi Bersenjata.</p> <p>e. Polisi Perkebunan (<i>CulturPolitie</i>);</p> <p>Polisi Perkebunan yaitu Polisi yang bertugas di perkebunan pemerintah kolonial.</p> <p>f. Polisi Pangreh Praja (<i>BestuurPolitie</i>).</p> <p>Polisi Pangreh Praja ini jumlahnya terbanyak dan merupakan kesatuan-kesatuan kecil di daerah-daerah di bawah pimpinan Camat, Wedana dan Bupati. Polisi ini terdiri dari Agen Polisi dan Mantri Polisi.</p> <p>Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman Penjajahan Belanda: Pada saat ini mulai dibentuk rancangan peraturan Kepolisian dan peradilan.</p> <p>3. Sejarah Kepolisian pada Zaman Pendudukan Jepang</p> <p>a. Pada saat kedatangan Jepang di Indonesia 8 Maret 1942, susunan Organisasi Kepolisian terbagi-bagi menjadi regional tidak terpusat dan masing-masing regional mempunyai kantor pusat sendiri-sendiri. Jumlah Polisi yang diserahkan terimakan dari pemerintah Belanda sebanyak 31.620 orang yang terdiri dari, 10 Hopkomisaris, 117 Komisaris Polisi, 13 Wedana Polisi, 63 Hopinspektur Polisi, 88 asisten wedana, 545 Inseptur Polisi, 1.463 Mantri Polisi, 513 Hopagen Polisi, 154 Hopposhui Komandan, 2.582 Poshuis Komandan/ Resrse dan 26.073 agen Polisi.</p> <p>Kepolisian di Indonesia pada zaman ini terbagi menjadi 4 Regional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepolisian di pulau Jawa dan Madura, dibawah pimpinan balatentara angkatan darat (Rikugun); 2) Kepolisian di pulau Sumatera berkantor pusat di Bukit Tinggi, dibawah kendali bala tentara angkatan darat
--	---

	<p>(Rikugun);</p> <p>3) Kepolisian regional timur besar meliputi pulau-pulau Sulawesi, Maluku, Irian Barat, berkantor pusat di Makassar dibawah kendali (Pemerintah) bala tentara angkatan laut (Kaigun);</p> <p>4) Kepolisian dipulau Kalimantan berkantor pusat di Banjarmasin dibawah Pemerintah bala tentara angkatan laut (Kaigun).</p> <p>b. Tahun 1944 Lahir Tokubetsu Keisatsu Tai (Polisi Istimewa), dibentuk pada setiap syu, Kochi, Jawa dan Madura, yakni sebuah pasukan yang mobil dan mempunyai persenjataan yang lebih lengkap daripada persenjataan warisan dari Polisi Hindia Belanda. Pembentukan pasukan ini dimaksudkan agar dapat digerakan sebagai pasukan penggempur dibawah pemerintah Syu Chaing Butyo, dengan sebutan Tokubetsu Keisatsu Tai. Pasukan ini disebut karesidenan mempunyai jumlah anggota antara 60 orang sampai 150 orang.</p> <p>Penetapan jumlah anggota sangat dipengaruhi oleh letak dan arti pentingnya suatu karesidenan. Karesidenan priangan dan surabaya juga kota Praja Istiwewa Jakarta masing-masing mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak bila dibandingkan karesidenan lainnya. Kesatuan Polisi ini dipersenjatai Karabijn, Water mantel, untuk masing-masing anggota dan ditambah dengan beberapa senapan mesin. Maksudnya agar kesatuan ini dapat dipergunakan dan digerakan apabila terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum yang tingkat intensitasnya tinggi seperti, huruhara, kerusakan dan perampokan.</p> <p>Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman pendudukan Jepang: Bahwa tugas Polri mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.</p> <p>4. Sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>a. Terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>Sejarah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 memasukkan Kepolisian dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian status Djawatan Kepolisian Negara (DKN) secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum pada masa Penjajahan Belanda (Agus Wiradiharja, 1971 : halaman 11).</p> <p>Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 29 September 1945, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmojo diangkat menjadi</p>
--	---

	<p>Kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Pengangkatan Rd. Said Soekanto Tjokrodjatmodjo sebagai Kepala Kepolisian merupakan titik awal adanya Polisi sebagai Polisi Nasional.</p> <p>Prioritasnya adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur Polisi, Watak Polisi dan Falsafah Hidup Polisi dari struktur lama, baik zaman Belanda maupun Jepang (Dr.Hadiman, 199 : halaman 37).</p> <p>Pada situasi dan kondisi tersebut diatas dimanfaatkan oleh Anggota Polri untuk melakukan perubahan-perubahan di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I, Mochamad Jasin memproklamasikan kedudukan Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 1945. Adapun Proklamasi berbunyi : “Oentoek bersatoe dengan rakyat dalam perjoengan mempertahankan Proklamasi Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi sebagai Poelisi Indonesia”.</p> <p>b. Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri.</p> <p>Berdasarkan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD tanggal 25 Juni 1946, terhitung mulai tanggal 1 juli 1946 Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri langsung dibawah Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polri setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan Menteri. Dengan ketetapan ini pemerintah mengharapkan Polisi akan dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai kecamatan-kecamatan. Peristiwa pengalihan status Kepolisian dari Departemen Dalam Negeri oleh kalangan Kepolisian dianggap penting, sehingga setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara.</p> <p>Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Awal Kemerdekaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan Polisi sangat dibutuhkan oleh Negara yang pada saat ini baru 2 (dua) hari memproklamasikan Kemerdekaannya. 2) Diangkatnya R. Said Soekanto Tjokrodjatmodjo merupakan titik awal adanya Polisi sebagai Polisi Nasional. 3) 1 Juli 1946 merupakan hari yang sangat penting dan bersejarah bagi Kepolisian karena pada saat itu Kepolisian Negara Republik Indonesia beralih status menjadi jawatan tersendiri sehingga dijadikan sebagai hari Bhayangkara.
--	--

5. Sejarah dan Nilai-nilai Kejuangan Kepolisian Negara dalam Menghadapi Tentara Jepang

Setelah berita Proklamasi Kemerdekaan diketahui, maka para Kepala Polisi/Komandan tanpa diperintahkan mengambil inisiatif menamakan dirinya sebagai Polisi Republik Indonesia. Sebelumnya mereka adalah anggota Polisi Jepang. Tidak gampang pada waktu itu, semua kegiatan untuk menjalankan roda pemerintahan dihalang-halangi oleh tentara Jepang yang masih memegang senjata lengkap.

Tentara Pembela Tanah Air (PETA) mengharapkan, mulai tanggal 19 Agustus 1945 Jepang sudah melucuti senjatanya dan digudangkan. Satu-satunya organisasi yang tidak dilucuti senjatanya adalah Polisi, yang ada di Indonesia, pada waktu itu berjumlah ± 24.000 anggota dengan persenjataan berimbang.

Dibeberapa Kantor Polisi di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berkibar Bendera Merah Putih, anggota Polisi yang ada telah melepas atribut Jepang yang melekat di uniformnya dan menggantinya dengan Merah Putih, seperti di Pet dan Baju.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, anggota Polisi Jakarta sudah mulai mengatur Jalan Raya dalam pelaksanaan pawai menyambut Kemerdekaan Indonesia. Di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi I Muhammad Yassin memproklamasikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, teksnya diperbanyak dan ditempelkan ditempat-tempat keramaian kota Surabaya.

Ketika pengibaran Sang Merah Putih di depan kantor Pasukan Polisi Istimewa Surabaya terjadi insiden dengan tentara Jepang, Sang Merah Putih yang berkibar dipuncak tiang, diturunkan kembali oleh tentara Jepang, tetapi kemudian Sang Merah Putih dinaikan kembali pada tiangnya dililitkan pada kawat berduri. Pada esok harinya PPI ini melakukan pawai bersenjata melalui jalan-jalan besar kota Surabaya dibawah pimpinan Inspektur Polisi I Muhamad Yassin ataupun yang dipimpin Inspektur Polisi II Sucipto Danukusumo. Bersama-sama pejuang bersenjata lainnya berhasil merebut senjata dari Jepang di Don Bosco Markas Komando Pertahanan Jawa Timur, Gubeng dan meduduki Gedung Kompetai sebagai Lambang kekuasaan Jepang.

Peristiwa penurunan Bendera Jepang Hinomaru dan penaikan Merah Putih di Cokan Kantai diikuti oleh ribuan lapisan masyarakat Yogyakarta yang bersenjata lengkap. Setelah pengibaran Merah Putih di Cokan Kantai itu, diadakan demonstrasi sepanjang Malioboro yang dikawal oleh pasukan Polisi Istimewa Yogyakarta tersebut. Pada saat itu hampir saja pertumpahan darah terjadi, tetapi untunglah dapat dihindarkan, padahal pada waktu itu situasi sudah sangat genting dimana berhadapan langsung antara Kompi Polisi Istimewa dengan Hei Tai dari Markas Tentara Jepang di Pingit yang sama-sama bersenjata lengkap. Saat yang krisis ini terjadi di

depan gedung bioskop Ratih-Yogyakarta, dimana kedua belah pihak sudah siap tempur.

Pada hari-hari berikutnya di Yogyakarta berkobar gerakan Pengambil alihan Kekuasaan di Kantor-kantor Pemerintahan Jepang. Gerakan ini dipimpin R.P. Sudarsono yang dimulai dari kantor Zimu Kyoku-Yogyakarta. Puncak dari pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang di Yogyakarta adalah penyerbuan merebut senjata Tentara Jepang yang mendiami Tangsi Kota Baru – Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Pada waktu itu pasukan Jepang yang mendiami Tangsi Kota Baru itu adalah Pasukan Kidobutsi (Batalyon Kido).

Di Kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kepolisian terlibat langsung menghadapi Tentara Jepang yang mencoba menghalangi pemerintah Indonesia, seperti di Semarang dalam pertempuran 5 (lima) hari dibawah pimpinan Inspektur Polisi I R.M. Bambang Suprpto Dipokusumo, di Sukabumi Komisaris Polisi R. Saleh Sastranegara melucuti Jepang.

Di Makassar dibawah pimpinan Komisaris Lanto Daeng Paewang, berhasil mengambil alih kekuasaan dari Kepolisian Jepang dan mulai akhir Agustus 1945, berkibarlilah Sang Merah Putih di depan Kantor Polisi menggantikan Bendera Jepang Hinomaru.

Di Padang Sidempuan. Polisi Istimewa dibawah pimpinan Inspektur Polisi I M. Kadiran melucuti senjata Jepang di Balige, Tarutung, Kotanopan dan Sibolga.

Di Pulau Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Jaya sampai saat ini belum ada data yang menonjol dari kegiatan-kegiatan Kepolisian guna menegakan kemerdekaan. Sebagaimana diketahui setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, beberapa hari kemudian tentara Sekutu yang diwakili oleh tentara Australia sudah mendarat di pulau-pulau itu.

Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah dalam menghadapi tentara Jepang:

- a. Polisi merupakan Pasukan pertama yang memiliki senjata dan disiplin tinggi.
- b. Setelah Proklamasi Kemerdekaan melepas atribut Jepang yang melekat di unifromnya dan menggantinya dengan Merah Putih seperti pet, baju dan langsung menghadapi pasukan Jepang.

6. Sejarah Kepolisian Menghadapi Tentara Sekutu dan Belanda

Dalam bulan September dan Oktober 1945 Tentara Sekutu yang diwakili oleh Tentara Inggris mendaratkan pasukannya di pulau Sumatera, Jawa dan Madura untuk melucuti dan memulangkantentara Jepang ke Negerinya. Semula Pemerintah

	<p>Indonesia menolak kedatangan Tentara Sekutu ini, tetapi setelah Komandannya (<i>Jenderal Oristison</i>) mengakui Negara Republik Indonesia secara “Defacto” serta menghormati kedaulatannya, barulah Tentara Sekutu itu diizinkan mendaratkan pasukannya antara lain : Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang dan Surabaya.</p> <p>Kedatangan Tentara Sekutu ini mula-mula disambut dengan baik oleh Republik Indonesia dan membantu tugas-tugasnya Tentara Sekutu itu. Tetapi setelah Pemerintah Indonesia mengetahui bahwa di dalam Pasukan Sekutu tersebut ikut membonceng Tentara Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, maka bentrokan bersenjata dengan Tentara Sekutu dan Belanda itu tidak dapat lagi dihindarkan. Sebetulnya sebelum Tentara Sekutu ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945, dalam Perjanjian Portdam telah disepakati antara Ratu Inggris dan Ratu Belanda, bahwa Inggris akan membantu Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia seperti sebelum pecahnya Perang Dunia ke II.</p> <p>Kepolisian Republik Indonesia banyak juga membantu tugas-tugas Sekutu guna memulangkan Tentara Jepang, seperti pengawalan dari Cam Concentrasi, naik kereta api sampai ke pelabuhan kapal laut. Bulan April 1946, Tentara Sekutu telah selesai menjalankan tugasnya, yaitu mengembalikan tentara Jepang ke Negerinya. Meninggalkan Tentara Belanda dengan aparat pemerintahannya yang sudah kuat dan berjalan lancar, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia mulai terdesak. Presiden sudah ke Yogyakarta dan Pusat Kepolisian di Purwokerto.</p> <p>Prajurit Belanda yang dari Eropa ini adalah pasukan yang baru selesai menghadapi Tentara Nazi-Jerman atau pasukan yang dilatih khusus menghadapi Perang Dunia ke II yang pada waktu itu masih berkecamuk. Namun demikian Bangsa Indonesia tidak gentar menghadapinya, tekad “lebih baik hancur dari pada dijajah” bergelora disetiap dada mereka.</p> <p>Begitu juga halnya dengan Pejuang Prajurit Kepolisian. Mereka menyusun kekuatan, berjuang secara kelompok-kelompok menghadapi Tentara Belanda dalam pertempuran antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertempuran di Desa Tumpeng/Lumajang 13 Oktober 1947 dipimpin oleh Inspektur Polisi I Jama’ari, 28 anggotanya gugur bersamanya, 24 orang ditangkap Belanda, 5 orang dapat menyelamatkan diri. Pasukan Jama’ari ini menghadapi Pasukan Belanda dari Kesatuan Baret Hijau yang baru datang di Indonesia dari Gana. Pertempuran di Jombang dipimpin oleh Komisaris Polisi Sucipto Danukusumo. Pertempuran di Purwokerto, dipimpin oleh Inspektur Polisi II R.M. Bambang Suprpto. Pertempuran di Rimbo Panjang Palupuh dipimpin Inspektur Polisi I Amir
--	--

	<p>Machmud. Pertempuran di Benteng Huraba Tapanuli Selatan yang dipimpin Inspektur Polisi I R Kadiran.</p> <p>c. Pertempuran di Jomerto Jember dipimpin oleh Inspektur Polisi I M. Sukari dan lain-lain.</p> <p>Pada periode perang mempertahankan kemerdekaan ini tugas Kepolisian selain tugas menghadapi Tentara Belanda/Sekutu/Jepang, juga menjalankan tugas-tugas umum. Tetapi pada saat ini boleh dikatakan tidak ada gangguan Kamtibmas, selain perang dan menghadapi (pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948). Dapat dikatakan pada waktu pecahnya pemberontakan, Kepolisian yang menjadi sasaran umumnya : Polres Magetan secara sadis, Kepala Kepolisian Karisidenan Madiun Komisaris Polisi Sunaryo Tirtodiprojo Suprpto ditahan, untung belum sempat dibunuh, karena Pasukan Tentara dan Mobrig pimpinan Inspektur Polisi I Moh. Yasin segera membebaskan kota ini pada Oktober 1948.</p> <p>7. Sejarah Kepolisian dalam Menanggulangi Peristiwa 3 juli 1946</p> <p>Pada tanggal 3 Juli 1946 satu Kompi Polisi Istimewa Jatim di bawah pimpinan Inspektur Polisi II Imam Bachri diberangkatkan ke Madiun dan terus ke Yogyakarta untuk memperkuat keamanan Pemerintahan R.I. terhadap usaha Tan Malaka yang hendak menggulingkan Pemerintahan R.I. yang syah.</p> <p>8. Sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap I (21 Juli 1947)</p> <p>Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia, akan tetapi setelah diketahui Pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Tentara NICA yang hendak menegakan kembali kekuasaan Kolonial Belanda di Indonesia, maka sikap Bangsa Indonesia berubah menjadi curiga bahkan menentang. Situasi kemudian semakin cepat menjadi buruk terutama setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang Belanda yang baru dilepaskan dari kamp-kamp tawanan Jepang, kemudian orang-orang NICA dan KNIL tersebut mulai melancarkan atau memperuncing kerusuhan dengan mengadakan Provokasi.</p> <p>Bentrokan-bentrokan dengan Belanda tidak dapat dihindarkan, walaupun perundingan Linggarjati untuk mencari penyelesaian telah berlangsung, karena memang Belanda telah berniat untuk menguasai kembali Indonesia. Oleh karena itu selama rangkaian perundingan berjalan, Van Mook telah merancang dan mulai menyusun suatu Struktur Negara Federal yang dikendalikan oleh Belanda. Kelicikan Belanda ini mengakibatkan perasaan Anti Belanda semakin tebal dikalangan rakyat, sehingga pertempuran dengan tentara Belanda semakin meluas.</p>
--	---

	<p>Melihat situasi yang semakin genting itu, Pemerintah Belanda segera melaksanakan suatu tindakan Militer dengan alasan untuk mengamankan situasi yang dipandang cukup membahayakan kekuasaan mereka. Tindakan ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.</p> <p>Agresi Militer Belanda Pertama, menyebabkan terganggunya pembangunan Kepolisian Negara, karena Polisi turut dalam usaha pertahanan, disamping menjalankan tugas Kepolisian, juga Polisi dikerahkan ke garis depan untuk melawan Tentara Belanda ; seperti perlawanan di Sumatra Timur yang dipimpin oleh R. Soeroyo, menunjuk Inspektur Polisi I M. Hasan untuk konsolidasi Kekuatan Polisi.</p> <p>Pada pertengahan tahun 1947, di tengah-tengah suasana pertempuran melawan tentara Belanda, Kepolisian di Sumatera diubah namanya menjadi Jawatan Kepolisian Negara yang berpusat di Bukit Tinggi dan dikepalai oleh AKBP Umar Sahid, dan sebagai Wakil, AKBP Sulaiman Effendi.</p> <p>Kemudian struktur Kepolisian Sumatera diadakan perubahan lagi dan dibagi menjadi 3 (tiga) Daerah Kepolisian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumatera Utara meliputi; Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dengan Kepala Polisi AKBP Darwin Karim. Sumatera Tengah meliputi ; Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Kepala Polisi AKBP Sulaiman Effendi. Sumatera Selatan meliputi ; Palembang, Bengkulu dan Lampung dengan Kepala Polisi R.M. Mursodo. <p>Di Jawa Barat, Kesatuan Kepolisian diantaranya yang dipimpin oleh Inspektur Polisi II Rahmat Setiadiwirja dan Agen Polisi III S. Kandi, melakukan serangan-serangan secara gerilya terhadap pos-pos pertahanan Belanda.</p> <p>Sehubungan dengan adanya Perjanjian Renville, maka Daerah Kantong gerilya harus dikosongkan. Pasukan Polisi Istimewa yang melakukan perang gerilya disekitar daerah Bogor, Sukabumi, Sumatera, Garut dan daerah-daerah lainnya hijrah menuju Yogyakarta dan menggabungkan diri dengan pasukan Polisi Istimewa Jawatan Kepolisian Negara, dibawah pimpinan Komisaris Polisi Brotomurdokusumo. Di Jawa Tengah, pasukan Polisi yang mengadakan serangan Belanda diantaranya ; Pimpinan Komisaris Polisi R. Hartoyo, dan Inspektur Polisi II R.M. Bambang Suprpto, serta Ajun Inspektur Polisi Doumas Iskandar.</p> <p>Di wilayah Jawa Timur, terjadi perlawanan-perlawanan Kesatuan Polri terhadap Tentara Belanda diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobile Brigade Besar Jawa Timur yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Moehammad Yasin.
--	--

	<p>b. Kesatuan-kesatuan Polisi dari Batalyon I Mobile Brigade Besar (MBB) Jawa Timur di bawah pimpinan Komisaris Polisi Sukardi.</p> <p>c. Pasukan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) Malang di bawah pimpinan Inspektur Polisi II Samsuri Moertoyoso.</p> <p>d. Kesatuan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) Surabaya dibawah dipimpinan Inspektur.</p> <p>9. Sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda tahap II</p> <p>Perjanjian <i>Renville</i> ternyata tidak mampu mengakhiri Konflik Indonesia-Belanda. Belanda ingin memforsir penyelesaian politik yang tidak kunjung selesai itu dengan kekerasan Militer. Akhirnya Tentara Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui dan tidak terikat lagi kepada perjanjian tersebut.</p> <p>Pada tanggal 19 Desember 1948, Tentara Belanda menyerbu Republik Indonesia yang dimulai dengan menduduki Ibukota Yogyakarta dengan Agresi Militer Belanda II. Presiden dan Wakil Presiden bersama sejumlah Pejabat Tinggi Pemerintah ditangkap dan diasingkan ke Bangka.</p> <p>Tetapi sementara itu kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia telah diberikan kepada Mr.Syafrudin Prawiranegara (Yang sedang berada di Bukit Tinggi) untuk memimpin suatu pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatra, dan mengirim kawat kepada Duta Besar R.I. di New Delhi India untuk menyelenggarakan Pemerintahan di India apabila di Bukit Tinggi gagal. Dengan adanya serangan Tentara Belanda itu kesatuan-kesatuan yang tadinya hijrah ke Daerah - Republik Indonesia mulai bergerak kembali ke daerah kantong-kantong yang ditinggalkan.</p> <p>Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II: agar petugas Kepolisian mempunyai sikap rela berkorban, menunjukkan jiwa korsa, cinta tanah air, gotong royong, tidak mudah menyerah dan menjaga persatuan.</p> <p>Dalam situasi yang belum stabil Polri berusaha membangun Organisasi, walaupun tetap harus berjuang digaris depan untuk melawan Tentara Belanda.</p> <p>10. Sejarah Kepolisian dalam pembentukan Polisi Wanita</p> <p>Polisi Wanita Indonesia (Polwan) dibentuk pada tanggal 1</p>
--	--

	<p>September 1948 ketika Indonesia sedang dalam situasi genting. Pembentukan tersebut dimulai ketika Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi membuka pendidikan bagi Polwan. Pada awalnya terdapat 12 calon Polwan yang mendaftar. Namun, hanya 6 polwan yang diterima untuk mengikuti pendidikan “Pembantu Inspektur Polisi” setelah melalui tahapan seleksi. Adapun 6 Polwan yang diterima yang merupakan generasi Polwan pertama di Indonesia sebagai berikut Nelly Pauna Situmorang, Mariana Saanin Mufti, Djasmaniar Husein, Rosmalina Pramono, Rosmalia Taher, dan Dahniar Sukotjo. Dengan adanya kehadiran Polwan, diharapkan dapat menggantikan peranan istri. Polisi ataupun Pegawai Sipil Polisi Wanita sebagai penyidik/pengeledah tersangka wanita ataupun anak serta mengayomi korban kejahatan yang dialami oleh wanita dan anak.</p> <p>Setelah Kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, DKN mulai menata hal-hal internal. Polwan juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh R.S. Soekanto. Hal tersebut terbukti ketika keenam Polwan yang dididik di Bukittinggi diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka di Sukabumi sebagai calon Inspektur Polisi. Selain itu, mereka juga berhasil membentuk Seksi Polisi Wanita meskipun sempat dibubarkan. Selanjutnya, pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia III yang diselenggarakan di Palembang, 6 Maret 1955 merupakan cikal bakal perkembangan Polisi Wanita di Indonesia salah satu tindak lanjut dari keputusan kongres tersebut adalah akan membuka kembali pendidikan bagi Polwan setelah adanya studi banding oleh para anggota Bhayangkari di Amerika Serikat.</p> <p>Hal itu disusul dengan Konferensi Kepolisian di Ciloto pada 1961. Hasil dari konferensi tersebut mendorong jumlah anggota Polwan di tubuh DKN. Oleh karena itu, pendidikan Polwan semakin berkembang sehingga, para wanita diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik di AAK maupun PTIK. Cikal bakal Sepolwan dimulai ketika Komdak VII Jaya (polda metro jaya) membuka Sekolah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Sakri) cabang Ciputat pada April 1963 yang menggantikan Sakri cabang Kramat Jati. Kemudian pada tahun 1968, Sakri cabang Ciputat berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian dan Latihan (Deplat) 007 Ciputat. Pada tahun 1975 Deplat 007 ciputat berubah menjadi Depo Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) 007 Ciputat dan untuk pertama kalinya pada tahun 1975/1976 Dodiklat 007 Ciputat mendidik Bintara Polwan. Kemudian pada tahun 1982 Dodiklat 007 berubah menjadi sekolah Bintara 007 ciputat serta menjadi tahun pertama bagi lembaga pendidikan yang khusus mendidik Polisi Wanita.</p> <p>Tonggak pusat pendidikan Polwan dimulai tanggal 24 Januari 1984 ketika tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Kolonel Polisi Dra.</p>
--	---

P. Erda Latuasan Tarigan, hal ini dituangkan dalam Skep Kapolri No. Pol.: Skep/32/I/1984 tanggal 24 Januari 1984. Perubahan bukan hanya pimpinan dari polisi pria ke polisi wanita tetapi juga perubahan kepangkatan dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel Polisi. Selanjutnya, tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun sepolwan. Pada tanggal 30 Oktober 1984 Pusdik polwan diubah menjadi Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan berada di bawah Direktorat Pendidikan Polri yang sebelumnya di bawah Kobangdiklat. Kemudian pada tahun 1992 Sepolwan berada di bawah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, yang sekarang telah berubah menjadi lembaga pendidikan Polri.

POKOK BAHASAN II

SEJARAH PAHLAWAN NASIONAL M.JASIN

1. Peran M.Jasin dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Proklamasi Polisi Istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia



Segera setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia, Moehammad Jasin sebagai aparat keamanan Jepang segera mengadakan rapat pada tanggal 20 Agustus 1945 untuk merumuskan teks Proklamasi yang menyatakan bahwa Polisi istimewa yang ada pada pemerintahan Jepang sebagai Polisi Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945 pukul 07.00 anggota kesatuan Polisi istimewa yang berjumlah 250 orang dengan dipimpin oleh Moh Yamin berkumpul di halaman depan markas untuk membacakan teks proklamasi pernyataan Kepolisian Istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia. Bunyi teks Proklamasi Polisi Istimewa adalah sebagai berikut:

Proklamasi

*Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan
mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan ini
menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik
Indonesia. Surabaya, 21 Agoestoes 1945*

*ttd Moehammad Jasin
Inspektoer Poelisi Tk.I*

Proklamasi ini disusun dengan adanya pawai senjata di sepanjang jalan tunjungan serta menyebarkan teks Proklamasi tersebut disepanjang jalan sambil meneriakkan pekik

	<p>“Merdeka”. Pernyataan Proklamasi tersebut merupakan sebuah pelopor bagi kesatuan-kesatuan Polisi Istimewa diseluruh Jawatimur untuk mendukung kemerdekaan RI serta mengambil alaih kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang.</p> <p>b. PelucutanSenjata di Gedung Kempetai</p> <p>Pada tanggal 1 oktober rakyat beserta badan-badan perjuangan lainnya serta pasukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) mengepung markas Kempetai.</p> <p>Ditengan desingan peluru, Moh Yasin berusaha untuk menerobos kawat berduri menuju ruang Kempetai. Ia berusaha untuk menemui taka hara seorang pembesar dari Jepang. Oleg Taka Hara M. Yasin diantar untuk menemaui Kempetaijo, mereka melakukan perundingan tentang penyerahan tentara Jepang. Dalam perundingan tersebut M. Yasin meminta agar kempetaiji menyerah kepada rakyat Surabaya dan M.Yasin sebagai komandan Polisi Istimewa berjanji untuk menjamin keselamatan tetara Jepang yang masih berada di Surabaya.</p> <p>Kempetaijo berunding dengan para stafnya mereka menuju keserampi muka. Tangan kempetaijo yang memegang sapu tangan yang merupakan milik M.Jasin tanganya diangkat tinggi-tinggi oleh M.Yasin didepan markas.tak lama kemudian bendera Jepang diturunkan oleh Takahara dan pertempuran berakhir.</p> <p>c. PelucutanSenjata di Don Bosco</p> <p>Don Bosco merupakan asrama Belanda yang digunakan oleh Jepang sebagai gudang senjata terbesar di Asia Tenggara.Pasukan yang menguasai Don Bosco adalah Dai 10360 Butai Kaisutiro Butai, dibawah pimpinan Mayor Hazimoto.</p> <p>Perebutan senjata di Dn Bosco dipelopori oleh Polisi Istimewa. Setelah berhasil menduiduki Don Bosco dengan banyak menelan korban, Bung tomo dari Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) melakukan perundingan dengan pemerintah Jepang agar Jepang menyerahkan senjatanya kepada rakyat Indonesia.</p> <p>Hasil kesepakatan adalah bahwa Komandan gedung Don Bosco dengan wakil Kompetai berjanji akan menyetujui permintaan rakyat setelah panglkima tentara Jepang di Jawa Timur mengetahui segenap perintiwa yang telah terjadi.</p> <p>Kesesokan harinya M. Yasin bersama-sama dengan rakyat datang ke Don Bosco untuk mendapatkan senjata dari pemerintah Jepang. Dalam perkembangnnya perundingan berlangsung dengan ricuh. Mengingat situasi yang tidak terkendali, M. Yasin yang melihat sikap Jepang yang sedang</p>
--	---

	<p>diliputi rasa bingung dan ragu-ragu langsung menggertak pihak Jepang untuk menandatangani surat pernyataan ““ Sign now or not!” akhirnya pihak Jepang menandatangani surat tersebut. oleh M.Yamin surat yang sudah ditandatangani dibawa keluar ruangan untuk diperlihatkan kepada rakyat yang menunjukkan bahwa Jepang sudah menyerahkan senjata. Penyerahan senjata berlangsung secara tertib dengan disajikan seluruh rakyat yang ada di Don Bosco. Setelah penerimaan penyerahan senjata dari pihak Jepang, senjata tersebut langsung dibagikan kepada rakyat dan badan-badan perjuangan yang lain.</p> <p>d. Menumpasgerakan Mayor Sabaruddin</p> <p>Mayor Zainal Sabaruddin, seorang periwra menengah Aceh yang ditakuti oleh berbagai kalangan karena dikenal sebagai sosok yang kejam membuat nama Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) menjadi rusak. Aneka kekezamannya dituturkan dengan berbagai bumbu tetap saja menyatakan hal yang sama tentang Sabaruddin sebagai seekor macan Sidoarjo.</p> <p>Aksi-aksinya sangat meresahkan masyarakat. Mulai dari penjarahan harta rakyat sampai dengan penculikkan untuk membalaskan dendam Sabaruddin kepada si korban. Salah satunya, H R Mohammad, ketika Mohammad berada di Yogyakarta untuk menghadap Panglima Besar Soedirman dan Letjen Oerip Soemohardjo. Ketika penculikkan terjadi, Mohamad sempat melakukan perlawanan tetapi, tetap saja pihak Sabaruddin yang menang karena banyaknya anak buah Sabaruddin yang mengeroyokinya hingga Mohammad tidak sadarkan diri. Kemudian, Mohammad dibawa oleh anak buah Sabaruddin dengan sebuah kendaraan hingga sampai di Kertosono pada tengah malam, rombongan Sabaruddin dihentikan oleh pasukan Soerachmad. Untungnya, Mohammad dapat dibebaskan meskipun Sabaruddin berjanji akan menangkapnya kembali. Setelah dibebaskan, Mohammad dirawat di sebuah rumah sakit di Kediri dan akhirnya, Mohammad dapat pulih kembali. Dibalik pencukikkan ini, Sabaruddin juga menaruh dendam yang cukup mendalam atas Mohammad karena pada waktu Sabaruddin mengajukan pendidikan calon komandan kompi, ia ditolak oleh Mohammad karena pendidikannya yang masih terbilang rendah sehingga ia ditetapkan sebagai komandan regu.</p> <p>Angkatan darat yang takut kepada kekejaman Sabaruddin sehingga, tidak ada satu pun dari pihak Angkatan Darat yang berani menindak aksi-aksinya. Hal tersebut membuat Panglima Besar Soedirman memanggil M.Jasin ke Yogyakarta untuk memberikan tugas agar M.Jasin dapat menumpas Mayor Sabaruddin. Setelah mendapat perintah, M.Jasin langsung mempersiapkan dua kompi dan mendapat bantuan dari Mobile</p>
--	--

Brigadir Karesidenan (MBK) Surabaya di Mojokerto sebanyak setengah kompi. Jadi, ada dua setengah kompi yang disiapkan untuk penangkapan Sabarudin. Setelah persiapan sudah selesai, pasukan yang dibawah pimpinan Pembantu Inspektur Polisi II Djakarsi diperkuat dengan sebuah mobil lapis baja.

Pada dasarnya, kekuatan tersebut dipersiapkan apabila ada perlawanan dari pihak Sabaruddin dan M.Jasin diberi tugas pula untuk melucuti mereka. Ketika P3 datang menuju markas Sabaruddin yang berada di Pacet, Sabaruddin langsung menyerahkan diri beserta anggota pasukannya. Pada saat proses penangkapan, M.Jasin berhasil menemukan delapan wanita Eropa yang hamil dan empat besek yang berisi engan perhiasan yang diduga hasil rampasan.

Akhirnya, Sabaruddin dibawa ke Yogyakarta untuk diadili oleh Markas Angkatan Perang di Yogyakarta dan dihukum penjara di Yogyakarta. Keberhasilan atas penumpasan gerakan Sabaruddin merupakan sebuah prestasi yang luar biasa karena Polisi Istimewa berhasil menyelamatkan wibawa pemerintah yang sedang menghadapi Sekutu.

Dari sifat-sifat heroisme yang dimiliki Moehammad Jasin, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) M.Jasin merupakan satu-satunya orang yang dipercayai oleh pihak Jepang maupun Sekutu dalam pengamanan kota Surabaya.
- 2) M.Jasin merupakan satu-satunya pihak yang diakui secara internasional sehingga, M.Jasin merupakan pemasok senjata satu-satunya di Surabaya baik untuk rakyat maupun untuk badan-badan perjuangan lainnya.
- 3) M.Jasin merupakan satu-satunya pihak yang berhasil menumpas aksi Mayor Sabaruddin sehingga, Moehammad Jasin sebagai komandan mendapat piagam penghargaan dari Panglima Besar Soedirman pada 4 Agustus 1947.

2. Komandan MBB jatim dalam Penumpasan PKI Madiun 1948



Persetujuan yang sudah disepakati di atas kapal Renville tidak membuat konflik Indonesia-Belanda berhenti meskipun Komisi Tiga Negara sudah mengusahakan yang terbaik. Pada 9 Januari 1948, Belanda memberi ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera mengosongkan sejumlah daerah gerilya. Situasi tersebut membuat Belanda menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 disusul penghentian tembak-menembak pada 19 Januari 1948.

Perjanjian Renville yang merugikan Indonesia menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Kabinet selanjutnya yang menjalankan perjanjian tersebut adalah Kabinet Hatta. Kemudian, peristiwa tersebut membuat Amir menjadi kubu oposisi dengan kabinet Hatta yang menolak program kerja mereka. Hal tersebut menyebabkan pemberontakan PKI Madiun disamping Muso yang baru datang dari Moskow dan dukungan dari unsur-unsur kiri seperti FDR. Akhirnya, pada 18 September 1948, FDR/PKI berhasil merebut Madiun dan memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia". PKI/FDR melakukan pelucutan senjata terhadap Mobile Brigade Karesidenan (MBK) Kediri yang dilakukan oleh Kolonel Dahlan dan menewaskan Letkol Soetarto. Situasi Madiun yang sudah dikuasai oleh PKI yang merupakan bentuk pemberontakan yang menginginkan RI berpaham komunis.

Berbagai aksi PKI yang brutal dan sadis membuat Mobile Brigade Besar Jawa Timur yang dipimpin oleh Moehammad Jasin mendapat amanat dari Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur untuk menumpas gerombolan PKI dan menguasai Madiun. Adapun susunan komando operasi penumpasan PKI Madiun sebagai berikut:

a.	Pimpinan operasi	Komisaris besar Polisi I M.Jasin
b.	Pengendalian operasi	Komisaris polisi II soetjipto Joedodiharjo
c.	Komendan Operasi	Inspektur Polisi I Soetjipto danoekoesoemo
d.	Komandan gabungan	Batalion Pembantu Inspektur polisi I Imam Bachtiar
e.	MBB Jawa Timur Wakil Komandan batalion gabungan	Pembantu Inspektur Polisi I Abdul Rachman

Setelah menyusun komando operasi, M.Jasin bergerak mulai dari Blitar menuju Nganjuk sebagai titik temu pasukan karena terdapat beberapa pasukan gabungan anatar MBK Surabaya dan MBK Kediri. Menurut strategi awal , mereka akan melintasi beberapa tempat seperti , Nganjuk-Sawah-Gunung Wilis-Dungus-Madiun.Tetapi, karena kepanikan warga Nganjuk yang terancam dari serangan PKI yang berasal dari arah barat melalui jalan besar Madiun-Nganjuk, rencana rute tersebut harus dirubah dan mereka melalui jalan besar Nganjuk-Madiun melalui Saradan,Caruban.

Pada 27 September 1948, pasukan bergerak ke Saradan. mereka mendapatkan perlawanan yang cukup berat dari PKI. Setelah pertempuran itu, Saradan berhasil diduduki oleh MBB pada pukul 14.30 dan menyebabkan dua anggota kompi Koesnadi terluka karena tusukan bambu runcing. Dari pertempuran tersebut, pihak MBB berhasil merampas kaki senjata Cungkir (senapan mesin buatan Jepang).Perjalanan dilanjutkan ke Caruban dan bermalam disana.Pada pukul 05.00, PKI menyerang pasukan MBB yang berada di Caruban.Pertempuran berlangsung singkat karena jumlah personil MBB lebih banyak daripada pasukan PKI. Selanjutnya, mereka menuju ke kota Madiun tanpa perlawanan. Setelah tiba di Madiun, M.Jasin mengintruksikan kepada seluruh pasukan MBB untuk tidak memasuki kota Madiun terlebih dahulu karena adanya sebuah ancaman bahwa penjara akan diledakkan, meskipun MBB merupakan kasatuan pertama yang masuk ke Madiun. Setelah menunggu tentara Siliwangi yang dari arah barat, MBB dengan gerak cepat segera memasuki kota Madiun. Setelah memasuki kota Madiun, pasukan MBB langsung membebaskan tahanan-tahanan PKI yang berada di Nglames dan sekitar Rejoagung. Pengejaran terhadap sisa-sisa PKI dilanjutkan ke Ponorogo berdasarkan perintah Kolonel Gatot Subroto. Pengejaran PKI dimulai dari kota Madiun menuju ke desa Kanigoro-Pagotan-

	<p>Nguteran-Dlopo-Kanten. Penumpasan PKI Madiun berhasil dengan kemenangan gemilang dan sisa-sisa gerombolan PKI yang masih hidup ada yang bersembunyi di perbatasan dan ada juga yang lari menuju ke Jawa Tengah.</p> <p>Bila dilihat dari sifat-sifat kepahlawanannya Moehammad Jasin mulai dari tindakan nasionalis yang memihak RI meskipun ia merupakan alat dari pemerintah Jepang, tindakan heroisme yang memproklamirkan Polisi Istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia, tindakan loyalitas ketika ia berusaha menyelamatkan ideologi negara dan goodwill pemerintah RI, hingga keiklasannya dalam berjuang baik dalam mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan.</p> <p>Secara historis, Moehammad Jasin telah mendapat Tanda Djasa Pahlawan dari Presiden Soekarno pada 1958 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya kepada bangsa dan negara.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 / TK / tahun 2015 tanggal 4 Nopember 2015 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan nasional,. Jendral Polisi Dr. H. Moehammad Jasin diangkat sebagai pahlawan Nasional.</p>
--	---



RANGKUMAN

1. Sejarah Kepolisian pada Zaman Kerajaan Majapahit, dalam sistem pengangkatan Raja di pulau Jawa, rakyat Jawa sangat patuh terhadap adat kebiasaan leluhurnya yaitu seorang Raja haruslah keturunan dari Raja, walaupun pada kenyataan ada Raja yang akan dinobatkan belum cukup umur atau cacat fisik, sehingga tidak mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan pemerintahan kerajaan.
2. Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Belanda Awal pemerintahan Hindia Belanda sebuah komisi untuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan Politie & Justitiwezen komisi terdiri dari tiga orang yaitu : Mr. Muntings, Mr. Maurisse dan Mr. Markus pada tanggal 8 April 1817 untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan peradilan.
3. Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang pada saat kedatangan Jepang di Indonesia 8 Maret 1942, susunan Organisasi Kepolisian terbagi-bagi menjadi regional tidak terpusat dan masing-masing regional mempunyai kantor pusat sendiri-sendiri.
4. Kepolisian di Indonesia Setelah Kemerdekaan sejarah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 memasukkan Kepolisian dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
5. Setelah berita Proklamasi Kemerdekaan diketahui, maka para Kepala Polisi / Komandan tanpa diperintahkan mengambil inisiatif menamakan dirinya sebagai Polisi Republik Indonesia.
6. Sejarah Kepolisian Menghadapi Tentara Sekutu dan Belanda. Dalam bulan September dan Oktober 1945 Tentara Sekutu yang diwakili oleh Tentara Inggris mendaratkan pasukannya di pulau Sumatera, Jawa dan Madura untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang ke Negerinya.
7. Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia, akan tetapi setelah diketahui Pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Tentara NICA yang hendak menegaskan kembali kekuasaan Kolonial Belanda di Indonesia, maka sikap Bangsa Indonesia berubah menjadi curiga bahkan menentang.



LATIHAN

1. Jelaskan sejarah kepolisian pada zaman kerajaan Majapahit!
2. Jelaskan sejarah kepolisian pada zaman penjajahan Belanda!
3. Jelaskan sejarah kepolisian pada zaman penjajahan Jepang!
4. Jelaskan sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia!
5. Jelaskan sejarah dan nilai-nilai kejuangan Kepolisian Negara dalam menghadapi tentara Jepang!
6. Jelaskan sejarah kepolisian menghadapi tentara sekutu dan Belanda!
7. Jelaskan sejarah kepolisian dalam menanggulangi peristiwa 3 juli 1946!
8. Jelaskan sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda I (21 Juli 1947)!
9. Jelaskan sejarah Kepolisian dalam menghadapi agresi militer Belanda II!
10. Jelaskan sejarah Kepolisian dalam terbentuknya Polisi Wanita!
11. Jelaskan peran M.Jasin dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia!
12. Jelaskan komandan MBB jatim dalam penumpasan PKI Madiun 1948!

Modul
02
**MASA DEMOKRASI
 PARLEMENTER/LIBERAL DAN MASA
 DEMOKRASI TERPIMPIN**

2 JP (90 Menit)

PENGANTAR

Dalam bahan ajar ini dibahas tentang sejarah Polri pada penumpasan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), sejarah Polri pada penumpasan gerakan Andi Azis, sejarah Polri pada penumpasan gerakan DI/TII, sejarah Polri pada penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), sejarah Polri pada penumpasan PRRI/PERMESTA, sejarah Polri pada masa operasi Trikora, sejarah Polri pada masa pertempuran-pertempuran dengan pihak Belanda dan sejarah Polri pada masa operasi Dwikora.


Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami sejarah Polri pada masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin.



KOMPETENSI DASAR

Memahami sejarah Polri pada masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin.


Indikator hasil belajar:


1. Menjelaskan sejarah Polri pada penumpasan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA);
2. Menjelaskan sejarah Polri pada penumpasan gerakan Andi Azis;
3. Menjelaskan sejarah Polri pada penumpasan gerakan DI/TII;
4. Menjelaskan sejarah Polri pada penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS);
5. Menjelaskan sejarah Polri pada penumpasan PRRI/PERMESTA;
6. Menjelaskan sejarah Polri pada masa operasi Trikora;
7. Menjelaskan sejarah Polri pada masa pertempuran-pertempuran dengan pihak Belanda;
8. Menjelaskan sejarah Polri pada masa operasi Dwikora.

	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok bahasan:</p> <p>Sejarah Polri pada masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin.</p> <p>Sub pokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Polri pada penumpasan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA); 2. Sejarah Polri pada penumpasan gerakan Andi Azis; 3. Sejarah Polri pada penumpasan gerakan DI/TII; 4. Sejarah Polri pada penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS); 5. Sejarah Polri pada penumpasan PRRI/PERMESTA; 6. Sejarah Polri pada masa operasi Trikora; 7. Sejarah Polri pada masa pertempuran-pertempuran dengan pihak Belanda; 8. Sejarah Polri pada masa operasi Dwikora.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Sejarah Polri pada masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin. 2. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 3. Metode game dengan EL (<i>Experiential Learning</i>) Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai, inspirasi dan terobosan dalam kegiatan terstruktur. 4. Metode NLP (<i>Neuro Linguistic Programming</i>) Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (<i>neuro</i>) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (<i>linguistic</i>) yang dilakukan secara berulang-ulang (<i>programming</i>).


	<p>5. Metode diskusi</p> <p>Metode ini digunakan untuk mendiskusikan tentang Sejarah Polri pada masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin</p> <p>6. Metode penugasan</p> <p>Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang diberikan.</p>
--	---

	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<p>1. Alat/media:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>; b. Laptop; c. <i>LCD</i>. d. Peta wilayah. <p>2. Bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kertas Flipchart. b. Alat tulis. <p>3. Sumber belajar:</p>

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap Awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya; b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap Inti : 70 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi sejarah Polri pada masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi

	<p>yang disampaikan oleh pendidik;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. e. Pendidik membagi peserta menjadi delapan kelompok diawali dengan bernyanyi; f. Pendidik mengawasi jalannya diskusi; g. Masing-masing ketua kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi kelompok lainnya; h. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. <p>3. Tahap akhir: 10 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bias diambil dari pembelajaran yang disampaikan. d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan. 2. Pendidik memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok mendiskusikan tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Pok 1 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada penumpasan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)t; b. Pok 2 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada penumpasan gerakan Andi Aziz; c. Pok 3 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada penumpasan gerakan DI/TII; d. Pok 4 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS); e. Pok 5 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada penumpasan PRRI/PERMESTA; f. Pok 6 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada masa operasi Trikora; g. Pok 7 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada masa pertempuran-pertempuran dengan pihak Belanda; h. Pok 8 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada masa operasi Dwikora;

**BAHAN BACAAN**

MASA DEMOKRASI PARLEMETER/LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Sejarah Polri pada Penumpasan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pada akhir tahun 1949 Jaksa Agung NIT (Negara Indonesia Timur), Seumokil menjatuhkan Hukuman Tembak kepada seorang Pejuang Sulawesi Selatan, yaitu Robert Wolter Monginsidi. Peristiwa ini kemudian meluas dengan adanya tindakan APRA menghabisi rekan-rekan Wolter Monginsidi di Sulawesi Selatan. Dalam pencarian para pejuang itu Westerling menerapkan metode Bumi Hangus hingga puluhan ribu penduduk pimpinan Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Untuk yang tak berdosa dibantai dalam waktu beberapa hari. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950.

Tindakan yang dibuat oleh Westerling ini kemudian menjadi kecaman yang sangat serius diantara masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga para pejuang berusaha untuk menangkap Westerling. Pengejaran yang dilakukan oleh Angkatan Perang dan Pasukan Mobile Brigade tidak berhasil menangkapnya, bahkan Westerling yang berhasil meloloskan diri ke Bandung dan terus melancarkan gerakannya, lengkap dengan persenjataan yang ada. Kota Bandung didudukinya selama 1 (satu) hari.

Menghadapi situasi ini, Kepala Jawatan Kepolisian Negara dengan segera mengirimkan Kesatuan Mobile Brigade yang dipimpin oleh Komisaris Polisi TK I Soetjipto Joediharjo.

Untuk menumpas pemberontakan tersebut pasukan Mobile Brigade mengadakan razia yang intensif, sehingga semua anasir APRA berikut senjatanya dapat dibersihkan. Dalam dropping pasukan dari Jakarta ke Bandung digunakan pesawat terbang dan ini merupakan Operasi Militer dengan pesawat yang pertama kali di Indonesia. Sebagian anggota APRA berusaha lari ke luar Bandung untuk menguasai Jakarta, tetapi tidak berhasil berkat kewaspadaan alat-alat Negara termasuk Kesatuan Mobile Brigade yang dipimpin oleh Moch. Jassin.

Dengan pecahnya pemberontakan APRA di Bandung pada awal tahun 1950 an di Jakarta muncul gerombolan Mat Item yang meresahkan warga Ibukota. Setelah diselidiki ternyata *Mat Item*.

Oleh Westerling gerombolan Mat Item Bersamaan ada hubungan antara APRA dengan Gerombolan Bersenjata ditugaskan untuk

	<p>mengganggu keamanan agar kelak memudahkan APRA menyerbu Ibukota dan membunuh para pimpinan R.I. Terutama anggota Kabinet R.I.S. yang berasal dari R.I. Hal itu menunjukkan bahwa Belanda tidak rela sepenuhnya menyerahkan kedaulatan kepada R.I.S. dengan membentuk “Bom Waktu” yaitu APRA.</p> <p>Situasi yang tidak aman sangat meresahkan warga Ibukota, oleh Komandan Mobile Brigade Pusat yaitu Moch. Jassin mengambil langkah-langkah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertama melakukan konsolidasi kesatuan dan melakukan unjuk kekuatan (<i>Show Of Force</i>) di Jakarta. Pameran kekuatan itu ditampilkan dengan kegiatan melakukan penggerebekan ke tempat-tempat yang menjadi basis pengacau keamanan Mat Item. Langkah berikutnya adalah pembangunan “Stelsel Keamanan” yaitu dengan mendirikan pos-pos dan asrama Mobile Brigade di daerah-daerah pinggiran kota Jakarta, seperti di Ciputat, Cileduk, Cengkareng, Cilincing, Cipinang, Pulogadung, Kramat Jati dan Kedung Halang. Ini berarti kota Jakarta dari 4 (empat) penjuru sudah dikelilingi Pasukan Mobile Brigade, sehingga pihak pengacau keamanan semakin terdesak dan kocar-kacir tidak terorganisir lagi. <p>2. Sejarah Polri pada penumpasan Gerakan Andi Azis</p> <p>Andi Azis adalah seorang Perwira Tentara KNIL bekas didikan Belanda dan ditugaskan di Sulawesi Selatan. Pada masa kemerdekaan, Andi Azis diterima untuk bergabung kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan pangkat Kapten.</p> <p>Ketika situasi politik sedang menghangat di Sulawesi Selatan dimana banyak terdapat gerilya bekas kelaskaran tidak diterima menjadi anggota Angkatan Perang R.I, pemerintah langsung mengirim Batalyon Tentara yang dipimpin oleh Letkol Worang. Ketika akan mendarat Ia melihat gelagat yang tidak beres dari Pasukan Andi Azis disekitar Pelabuhan. Untuk menghindari pertumpahan darah, Andi Azis selaku Komandan Penyambutan memberi isyarat kepada Batalyon. Worang untuk menunda pendaratan di Sulawesi Selatan. Rupanya isyarat dari Andi Azis ini ditanggapi lain oleh Batalyon Worang dan menganggap Andi Azis menghalangi misi keamanan yang diemban oleh Batalyon tersebut.</p> <p>Perbedaan persepsi antara Andi Azis dengan Worang ini melahirkan suatu pertentangan yang serius dari Andi Azis dan berubah menjadi Gerakan Pemberontakan. Tanggal 5 April 1950, Andi Azis menawan Staf Teritorium dan Panglimanya, yaitu Letkol TNI Ahmad Yunus Mokoginta. Pada tanggal 13 April 1950, Ia</p>
--	---

dinyatakan sebagai Pemberontak. Dalam penumpasan Andi Azis ini 2 (dua) kompi dari Kesatuan Mobile Brigade telah ikut menumpas pemberontakan tersebut.

3. Sejarah Polri pada Penumpasan Gerakan DI/TII

a. DI/TII di Jawa Barat

Ide awal dari pendeklarasian DI/TII ini berasal dari S.M. Karto Suwiryo yang menganggap Pancasila tidak sesuai untuk menjadi Dasar Negara Indonesia ; Konsep S.M. Karto Suwiryo adalah menjadi Islam sebagai Idiologi Negara dan menggulingkan

Tindak lanjut dari ide S.M. Karto Suwiryo ini adalah mencetuskan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat dan untuk memperkuat barisannya, Tentara Islam Indonesia (TII). Sejak itu mereka melakukan pemberontakan di hutan-hutan Jawa Barat.

Menghadapi pemberontakan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan upaya persuasive untuk menyelesaikan pertikaian dan perbedaan persepsi. Usaha itu tidak pernah membawa hasil, sehingga jalan terakhir Presiden Soekarno memerintahkan kepada pihak Angkatan Perang untuk melancarkan Operasi-operasi Militer. Dalam operasi Militer Penumpasan DI/TII dipimpin Karto Suwiryo karena pasukan Brimob Polri bersama-sama dengan angkatan Perang telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam menjaga keamanan Dalam Negri.

b. DI/TII di Aceh.

Seorang tokoh Pejuang Kemerdekaan yang telah banyak menyumbangkan darma bhaktinya, Tengku M. Daud Beureueh di Aceh mempunyai perbedaan pandangan dengan Pemerintah R.I. Perbedaan semakin lama semakin tajam, sehingga masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan damai ini akhirnya pecah menjadi sebuah pemberontakan.

Ketika Karto Suwiryo mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949, Tengku M. Daud Beureueh langsung menyatakan Aceh sebagai bagian dari NII pimpinan Karto Suwiryo.

Dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DI / TII di Aceh, M. Daud Beureueh melakukan pemberontakan menentang Pemerintah R.I. Untuk memadamkan pemberontakan M. Daud Beureueh ini akhirnya pemerintah melancarkan

	<p>Operasi Militer. Dalam melaksanakan Operasi Militer, Polri khususnya Mobile Brigade telah ikut mengambil bagian sehingga pemberontakan itu berhasil ditumpas.</p> <p>c. DI/TII di Sulawesi.</p> <p>Abdul Kahar Mudzakkar seorang tokoh pejuang asal Sulawesi Selatan, ketika Revolusi fisik terjadi - berjuang di Pulau Jawa dan kembali ke Sulawesi Selatan untuk mengkoordinir bekas pejuang kelaskaran dalam proses integrasi kedalam Tentara . Proses integrasi yang mereka tuntut adalah dimasukkannya bekas para pejuang di Sulawesi Selatan kedalam Tentara dengan 1 (satu) Brigade. Brigade yang akan dibentuk adalah Brigade Hasanuddin dengan pimpinan Letkol Abdul Khahar Mudzakkar sebagai Komandannya.</p> <p>Tuntutan para mantan gerilyawan di Sulawesi Selatan ini tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah-dalam hal ini Panglima Teritorium VII Wira Buana pada saat itu Kolonel Alex Evert Kawilarang. Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 7 Agustus 1953 Abdul Khahar Muzakkar memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (Darul Islam) di Makasar. Daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya langsung dinyatakan sebagai bagian dari NII Karto Suwiryo yang berpusat di Jawa Barat.</p> <p>Untuk menumpas DII/TII di Sulawesi Selatan ini Pemerintah langsung melancarkan Operasi Militer dari Devisi Siliwangi. Disamping itu Batalyon-Batalyon Mobrige Kepolisian merupakan kekuatan yang sangat penting dalam memulihkan keamanan di Sulawesi.</p> <p>d. DI/TII di Maluku.</p> <p>Pimpinan DI/TII di Sulawesi Abdul Kahar Mudzakkar melakukan usaha pelebaran Daerah Pemberontakan DI/TII hingga meliputi daerah Maluku. Pada tahun 1954 dan 1955 meletuslah Pemberontakan DI/TII di Galela (Halmahera), Seram Selatan, Seram Barat, Pulau Buru dan Pulau Sula. Oleh Pimpinan Angkatan Barat di Maluku, tugas pengamanan diserahkan kepada Kepolisian. Seluruh pemberontakan dipadamkan oleh Brimob dengan Komandan Komisaris Polisi V.E. Karamoy dengan dibantu oleh Ajun Komisaris Polisi J. Lino dan lain-lain, Kompi yang langsung dikerahkan adalah 5154, 5157 dan 5148.</p>
--	---

4. Sejarah Polri pada Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Ferry Seoumokil setelah menjatuhkan vonis hukuman tembak terhadap Robert Wolter Monginsidi di kecam oleh para politisi di Sulawesi Selatan. Mengingat posisinya sebagai Jaksa Agung Negara Indonesia Timur semakin terjepit, akhirnya Seoumokil melarikan diri ke Maluku dan mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS dimulai sejak dikumandangkan berdirinya RMS tahun 1952.

Pada awal tahun 1952 Kesatuan-kesatuan Mobile Brigade yang terbentuk pada tahun 1951, seperti Kompi 5157, 5154 dan 5160 digerakan untuk menumpas Pemberontakan RMS ini. Pada tahun-tahun berikutnya diperkuat dengan Kompi-kompi Organik lainnya, seperti 5121, 5148 dan 5487. Dua Kompi lainnya, seperti Kompi 5160 dan 5378 dipindahkan ke Pulau Jawa. Penyerangan terhadap Pemberontakan dilakukan oleh Pasukan Mobile Brigade dibawah Pimpinan Komisaris Polisi V.E. Karamoy dengan jalan dibantu oleh Kompi-kompi tempur yang didatangkan dari Kesatuannya di Jawa hingga Tahun 1956.

5. Sejarah Polri pada Penumpasan PRRI/PERMESTA

a. PRRI Sumatera.

Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan Gajah lahir dibawah Pimpinan Kolonel Simbolon di Medan. Menyusul berdirinya Dewan Gajah ini, pada tanggal 22 Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk di Padang dibawah Pimpinan Letkol Achmad Husein. Selanjutnya di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni pada tanggal 2 Maret 1957 dibawah Pimpinan Letkol Vience Sumual.

Dewan-dewan tersebut merupakan alat Kaum Politisi yang kontra revolusi untuk menentang Pemerintah Republik Indonesia dengan menamakan diri Pemerintah Revolusionir Republik Indonesia (PRRI). PRRI dicetuskan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawira Negara, SH bekas Menteri Kemakmuran R.I. dan bekas Presiden PDRI di Sumatera.

Terhadap bahaya yang mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia, Presiden selaku Panglima Tertinggi mengambil tindakan tegas dan memecat semua Pimpinan Dewan tersebut.

Selanjutnya Presiden/Panglima tertinggi memerintahkan kepada Angkatan Perang untuk menumpas Pemberontakan PRRI. Dalam suasana gawat yang menimpa Negara

	<p>Kesatuan-kesatuan Korp Mobile Brigade tetap menunjukkan Kesetiaannya terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menggerakkan Kesatuan-kesatuan untuk menumpas pemberontakan tersebut bersama dengan Angkatan Bersenjata lainnya dalam Operasi Tegas.</p> <p>1 (Satu) Batalyon Mobile Brigade dari Jawa Tengah di pimpin Komisaris Polisi Soetjipto Danoekoesoemo dan AKP Boedijoewono Gagak Pranolo didaratkan di Riau dan berhasil menduduki dan menguasai daerah tersebut. Disamping tugas mengadakan Konsolidasi kepada Batalyon tersebut diserahkan tugas untuk mengamankan dan melindungi Instalasi-instalasi Minyak Stanvac di Lirik dan Caltex di Rumbai dari gangguan pemberontak.</p> <p>Bersama Kesatuan-kesatuan operasi Tegas itu Angkatan Kepolisian mengirimkan Tim yang juga dipimpin oleh KP I Soetjipto Danoekoesoemo dengan tugas mengkonsolidasi dan menyusun kembali Angkatan Kepolisian setempat yang pada saat itu dalam keadaan tidak terorganisir tanpa Pimpinan akibat pengaruh dari Pemberontak.</p> <p>Setelah Fase Operasi Tempur Offensif terlaksana, maka Batalyon dari Jawa Tengah dibawah Pimpinan AKP Utoro juga ditugaskan ke Riau mendapat tanggung jawab Sector B di Teluk Kuantan guna mengadakan Operasi Teritorial Stabilisasi. Dalam rangka tugas ini telah terjadi pertempuran dengan pihak pemberontak. Demikian dengan Operasi Militer di Sumatera telah ditugaskan Kesatuan-kesatuan Brigadir Mobile dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta.</p> <p>Dalam Operasi Sapta Marga dari RTP (Resimen Team Pertempuran) 01 di Sumatera Utara telah dikerahkan Kesatuan-kesatuan Brigade Mobile dari Kalimantan, Jawa Barat dan Batalyon Pelopor. Untuk melaksanakan perintah dan tindakan tegas dalam menumpas Pemberontakan PRRI di Sumatera Utara. Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Brigadir Jenderal Djati Koesoemo, mengirim Pasukan yang sebagian diantaranya terdiri dari Kesatuan Brimob yang dipimpin oleh KP II Maskadiran dan AKP Soerojo mengadakan Operasi Penembusan (Penetration) dari Medan melalui Sumatera Timur Bagian Timur, dimana dalam Operasi ini terus mengadakan pertempuran-pertempuran sengit yang akhirnya sampai di Bukit Tinggi dan bertemu dengan Kesatuan-kesatuan Operasi 17 Agustus.</p> <p>Dalam Operasi 17 Agustus ini 2 (dua) Pleton Ranger (Pelopor) Kompi 5994 dapat menguasai kembali wilayah yang dikuasai PRRI dalam waktu 4 (empat) bulan. Disamping</p>
--	--

	<p>operasi ini, dengan Operasi Sapta Marga di Sumatera Timur dan RTP 01, Kesatuan-kesatuan Brigade Mobile secara bersama-sama menumpas pemberontakan diantaranya : Kompi 5163 dibawah pimpinan IP II Kawengiang dengan Kesatuan dari TNI dari Kalimantan mendarat dan menduduki Kota Sibolga. Pertempuran berlangsung terus menerus sehingga pada suatu ketika kedudukan pasukan ini sangat terancam. Selanjutnya terpaksa mendatangkan Kesatuan-kesatuan bantuan untuk menetralisasi keadaan itu, dan akhirnya dapat memperluas daerah sehingga kedudukan para pemberontak terdesak.</p> <p>Pada permulaan tahun 1959, kekurangan pasukan di Daerah Resimen II TT I / Bukit Barisan sangat dirasakan, sehingga Korp Mobile Brigade membentuk Detasemen "A" yang terdiri dari 4 (empat) Kompi, minus yang dikerahkan di daerah Simalungun. Setelah beberapa pertempuran terjadi, kesatuan ini dapat menduduki beberapa tempat yang seluruhnya dikuasai oleh pemberontak.</p> <p>Disamping kesatuan-kesatuan yang disebutkan diatas, banyak lagi Kesatuan Mobile Brigade yang dikerahkan ke daerah Sumatera Utara, diantaranya Kompi 5168 yang banyak berhasil dalam operasinya dan 1 (satu) Kompi Ranger/Pelopor Kompi 5994 mengadakan Operasi di daerah perbatasan Sumatera Utara/Aceh selama 3 (tiga) bulan berturut-turut menyerahkan I Resimen OSM / DI/TII, pimpinan Hasanuddin/Daud Beureueh. Dengan Operasi-operasi Militer yang dilaksanakan, maka kekuatan dan potensi pemberontak yang pada mulanya sangat besar dapat dilumpuhkan. Pelaksanaan penyerahan pasukan pemberontak PRRI di daerah Tapanuli Utara oleh Penguasa Perang dipercayakan kepada Batalyon 516 dan 517 Korps Mobile Brigade beserta seluruh alat dan kelengkapannya.</p> <p>Kolonel Simbolon beserta sebagian anggota pemberontak PRRI menyerahkan diri kepada pos-pos Mobile Brigade di Tapanuli Utara serta Letnan Kolonel A. Husein Gembong PRRI beserta sebagian besar pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri pada Kompi C Batalyon 516 Mobile Brigade. Dengan penyerahan pemberontak ini, maka pemberontakan PRRI dapat berhasil ditumpas dan akhirnya dapat dipulihkan kembali.</p> <p>b. Permesta di Maluku.</p> <p>Sejak Proklamasi Permesta, tanggal 2 Maret 1957 Komandan Brimob Maluku Komisaris Polisi V.E. Karamoy dengan seluruh Anggota Brimob yang berada dibawah Pimpinannya dan meliputi 6 (enam) Kompi secara tegas</p>
--	---

	<p>menyatakan taat sepenuhnya dan membantu Pemerintah Pusat di Jakarta.</p> <p>Ketegasan dalam pendirian ini yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan Pro Pusat oleh Brimob sangat merubah perimbangan di Maluku, dalam arti memperkuat dan menanamkan kewibawaan Pemerintah Pusat. Pada waktu Pasukan Permesta ke Maluku Utara dan menduduki beberapa tempat, Brimob merekrut 800 Pemuda Partisan dan mempersenjatai nya, kemudian bersama-sama Brimob berhasil melakukan serangan balasan. Lalu dilancarkan Operasi Mena I, gabungan antara Angkatan Perang bersama 1 (satu) Kompi Kombat (Tempur) Brimob untuk merebut Morotai. Hampir seluruh Pasukan musuh tertawan. Operasi Mena II, gabungan Angkatan Perang termasuk 2 (dua) Kompi Tempur Brimob dan 1 (satu) Batalyon Pasukan Pemuda Partisan dibawah binaan Brimob dilancarkan untuk merebut lapangan terbang Jailolo dan sekitarnya.</p> <p>Permesta menderita kekalahan dan sisa-sisanya melarikan diri ke hutan. Dalam peristiwa ini Permesta mendapat bantuan serangan dari Pesawat Udara yang dipiloti Allan Pope warga Negara Amerika Serikat untuk mengebom dan memblokade Pasukan Brimob. Untuk menangkis serangan udara ini, Brimob menyusun 1 (satu) Kompi Istimewa Penangkis serangan udara dengan persenjataan darurat 6 (enam) HMG Caliber 12,7 dan 6 BAR. Pemuda Partisan yang membantu Pemerintah Pusat yang dibina oleh Brimob dipersenjatai dengan senapan-senapan rampasan dari Permesta. Pemuda-pemuda Partisan ini, setelah para pemberontak dikalahkan, selanjutnya di seleksi kurang lebih 200 anggota untuk dididik dan dilatih di Dodiklat Brimob Tawangmangu-Jawa Tengah dan diangkat menjadi Pasukan Brimob Polri.</p> <p>Selama pemberontakan Permesta, Brimob Maluku kompak dan tidak ada satupun anggotanya yang menyeleweng. Untuk membersihkan sisa-sisa pemberontakan RMS di Pulau Seram dan Pasukan Brimob turut aktif bersama Angkatan Darat menumpas Permesta. Kekuatan Organik Brimob Maluku, berjumlah 6 (enam) Kompi ; yaitu 5121, 5148, 5154, 5157, 5487 dan Kombat Partisan dikerahkan secara maksimal.</p> <p>Disamping Komandan-komandan Kesatuan Mobbrig yang berjasa dalam penumpasan Permesta adalah Komisaris Polisi E.S.P. Sitompul dari Pasukan Mobile Brigade - Maluku Utara, Komisaris Polisi F.E.B. Taihutu adalah Wakil Komandan Mobbrig Maluku dan Inspektur Polisi Tk I Nurdin Basso sebagai Komandan Pasukan Polisi Istimewa.</p>
--	--

	<p>c. Permesta di Sulawesi.</p> <p>Di Sulawesi, Letkol Vience Sumual memproklamirkan Pemberontakan Rakyat Semesta pada tanggal 2 Maret 1957 bertempat di Manado. Perkembangan selanjutnya pemberontakan ini bergabung dengan PRRI pimpinan Letkol Achmad Husein di Sumatera sehingga namanya menjadi PRRI/Permesta.</p> <p>Seperti halnya PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi pun tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga Pemerintah terpaksa menggunakan kekuatan bersenjata untuk memadamkannya. Di Sulawesi Tengah, Pasukan Mobbrig mengepung Pasukan Permesta dari jurusan Tawaeli dibawah pimpinan Inspektur Polisi Sueb. Penyerangan yang dilakukan oleh Pasukan Mobbrig, pada tanggal 28 Maret 1958 tersebut meskipun hanya bersenjata sepuluh pucuk Carabine berhasil membersihkan kota Donggala dari serangan Pasukan Permesta yang dipimpin oleh Nelwan.</p> <p>Inspektur Tk I Sueb sebagai Kepala Polisi Donggala menggunakan taktik penggunaan potensi yang ada. Andi Mochtar yang ketika itu menjadi pejabat Raja Banawa di Sulawesi Tengah diangkat sebagai Wakilnya, meskipun baru berusia 22 tahun.</p> <p>Andi Mochtar segera memimpin Pasukan Mobbrig digabung dengan Pemuda-pemuda tangguh menjadi warganya. Satuan Mobbrig lainnya adalah pimpinan Ajun Inspektur Polisi Syukur bergerak dari jurusan Tawaeli kearah perbatasan Perigi. Pasukan ini berhasil menutup Kota, sehingga pasukan Permesta menjadi terjepit dengan dibantu Pasukan AURI yang melakukan pengintaian dari udara dan bantuan tembakan ke arah musuh Pasukan Mobbrig pimpinan Ajun Inspektur Polisi Syukur berhasil menghancurkan gudang mesiu dan perbekalan lawan di Pandere (60 Km disebelah selatan Palu).</p> <p>d. Peristiwa Cikini.</p> <p>Pada sekitar tahun 1950-1959 keadaan Politik Dalam Negeri semakin panas antara Partai Politik ada terjadi persaingan pengaruh dan kekuasaan. Pertentangan-pertentangan partai politik ini pada akhirnya melahirkan pemberontakan-pemberontakan terhadap Pemerintah R.I. dan terdapat kelompok-kompok yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap diri Kepala Negara.</p> <p>Pada tanggal 31 Oktober 1957 malam, ketika Presiden R.I. Ir. Soekarno hendak meninggalkan Gedung Sekolah Rakyat Cikini (Sekarang Jalan Cikini Raya) dan akan naik ke mobil</p>
--	--

terjadi usaha pembunuhan dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dalam peristiwa ini dua orang Anggota Pasukan Pengawal Pribadi Presiden Inspektur Polisi I Oding Suhendar dan Inspektur Polisi I Soedijo dengan semangat patriotisme yang tinggi langsung menempatkan diri untuk menjadi tameng dalam peristiwa tersebut. Kedua Perwira Polri ini langsung memeluk badan Presiden sehingga granat yang dilemparkan langsung mengenai diri mereka.

Peristiwa ini selain menimbulkan korban pada diri 2 (dua) Perwira Polisi diatas, juga masih terdapat anggota Polisi yang lain, yaitu Aipda Soemardi, Aiptu Ngatijono dan Aipda Toepan Waloejo. Namun pelaku pelemparan granat ini dapat ditangkap oleh petugas Reserse dalam waktu 1 X 24 jam dan dalam peradilan divonis hukuman mati.

6. Sejarah Polri pada Masa Operasi Trikora

Trikora adalah Tri Komando Rakyat yang berisi Perintah-perintah Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961, yaitu membebaskan Irian Barat dari tangan Kolonialis Belanda. Perintah Presiden Ir. Soekarno ini dikeluarkan dalam Pidato di kota Yogyakarta, yang isinya Pemerintah R.I. tidak mengakui lagi hasil KMB (Koferensi Meja Bundar) tahun 1949, bersiap-siap untuk mobilisasi umum dan kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Hal ini ditempuh oleh Presiden karena tidak ada perkembangan untuk membicarakan soal Irian Barat dengan Belanda, bahkan ada kecendrungan bahwa Belanda ingin mempertahankan dan menguasai Irian Barat tersebut.

Menanggapi pidato Kepala Negara tentang Trikora tersebut Pimpinan Kepolisian Negara selanjutnya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam tingkat Departemen segera dibentuk Staf Komando Pelaksanaan Pembebasan Irian Barat. Staf Komando ini memberi saran-saran kepada Menteri / Kepala Staf Angkatan Kepolisian yang berhubungan dengan Perjuangan Pembebasan Irian Barat.
- b. Menempatkan Perwira Polisi dalam Staf Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen TNI Soeharto.
- c. Membentuk kesatuan-kesatuan Tempur untuk merebut kembali Irian Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri / Kepala Kepolisian Negara No. Pol. : 64/SK/MK/1961 tanggal 16 Desember 1961 tentang Pembentukan Resimen Tim Pertempuran I (RTP I). Resimen ini terdiri atas gabungan kesatuan-kesatuan Brigade Mobile seluruh

Indonesia dan diresmikan pada tanggal 18 Februari 1962 bertempat di Asrama Brimob Yon 1232 / Kelapa Dua.

7. Sejarah Polri pada masa pertempuran-pertempuran dengan pihak Belanda

Detasemen Pelopor setelah selesai mendarat di Tanjung Fatagar segera mengadakan konsolidasi dan orientasi medan serta menyiapkan alat komunikasi Pesawat GRC 9. Segera diadakan komunikasi dengan Induk Pasukan di Gorom dan Ambon untuk melaporkan hasil misi penyeberangan tersebut. Berita itu diterima oleh AKP Anton Sudjarwo, selanjutnya ia memerintahkan agar melakukan serangan gerilya terhadap lawan. Pasukan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Kelompok 1 dan 2 dipimpin oleh AIP II Pranoto, terpusat di Tanjung Fatagar. Sedangkan kelompok 3 dan 4 dipimpin oleh AIP I Hudaya Sumaryo berpusat di sebuah bukit dekat Rumbati.

Kelompok 1 dan 2 bergerak mendaki di bukit-bukit Tanjung Fatagar kemudian disusul oleh kelompok 3 dan 4. Pada waktu pasukan bergerak ada perbekalan yang tertinggal, maka AIP II Pranoto memerintahkan kepada Yacob Malko dan Daliman mengambil perlengkapan tersebut, tetapi mereka diketahui oleh pihak Marinir Belanda dan terjadi kontak senjata tetapi keduanya bisa menghindari peristiwa tersebut. Sementara itu kelompok 3 dan 4 yang dipimpin oleh AIP I Hudaya Sumaryo sudah bergerak mendekati Bukit Tanjung Fatagar.

Pasukan Detasemen Pelopor ini bergerak menaiki bukit dan menuruni lembah dengan memakan apa saja yang bisa dimakan karena sulitnya mencari makanan di daerah tersebut. Usaha-usaha tersebut membawa hasil dan akhirnya pasukan Pelopor bisa menguasai medan maupun penduduk asli. Pada suatu hari Komandan Pelopor pergi ke pulau Was dengan beberapa anggota dan bertemu dengan seorang penduduk asli yang menasehati agar segera kembali ke hutan, sebab banyak tentara Indonesia yang mati karena serangan Tentara Belanda.

Dari kejadian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Kampung Rumbati, anak buah Raja Rumbati adalah Pro Indonesia. Bapak Muhammad Tahir Bauw sebagai Wakil Raja Rumbati menyarankan bila pasukan Pelopor mau bergerak ke Fak-fak hendaknya mengambil jalan dari Salakiti jangan melalui Rumbati, sebab akan memakan waktu lama. Lalu Wakil Raja Rumbati itu mengusahakan 6 (enam) perahu rakyat di daerah Tawar untuk mengangkut Pasukan menuju Salakiti. Setelah sampai tujuan Bapak Muhammad Tahir Bauw kembali ke Rumbati. Pasukan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 1 (satu) regu dipimpin oleh Haryanto menempati Salakiti sedangkan 1 (satu) regu

	<p>Hudaya Sumarya dengan beberapa anggota kembali ke Tawar. Beberapa waktu kemudian keberadaan regu Haryanto diketahui oleh Marinir Belanda dan kontak senjata tidak bisa dihindari. Dua Pasukan Pelopor tertawan oleh Belanda yaitu Adnan dan Arif Hiba.</p> <p>Pada suatu hari Belanda memanggil Wakil Raja Rumbati untuk dimintai pertanggung jawaban tentang lolosnya beberapa pasukan Pelopor yang masuk Rumbati, dengan tegas ia menjawab bahwa kesalahan itu adalah kesalahan tuan-tuan, mengapa penjagaan di pantai tidak ketat sehingga pasukan Pelopor bisa memasuki daerah Rumbati. Belanda juga menanyakan jenis senjata yang digunakan oleh pasukan Pelopor. Dari berbagai senjata yang diperlihatkan oleh Belanda tidak ada salah satupun senjata yang sama yang dimiliki oleh pasukan Pelopor. Pada waktu itu pasukan Pelopor menggunakan jenis senjata A.R. 15, yaitu senjata paling modern pada waktu itu. Beberapa hari setelah peristiwa itu Belanda meminta Muhamad Tahir Bauw datang ke Kokas tetapi hal ini ditolak oleh keluarganya, karena keluarga menganggap hal ini membahayakan keselamatan dirinya.</p> <p>Dalam perkembangan berikutnya Komandan Pasukan Pelopor membuat surat kepada penduduk asli agar menyampaikan kepada pihak Belanda di Pos-pos Patipi, Kokas dan Fak-fak. Isi surat bahwa Tentara R.I. sudah mendarat di pulau Was dan menunggu kedatangan Belanda. Dua hari kemudian Belanda menyerang Pulau tersebut dengan 2 (dua) buah kapal perang dan sebuah pesawat terbang Neptune, akhirnya terjadi kontak senjata. Pihak pasukan Pelopor tidak ada yang gugur, tetapi kehilangan satu set alat komunikasi.</p> <p>Tanggal 15 Agustus 1962 pasukan Hudaya Sumarya meninggalkan pulau Was menuju Bukit Tanjung Fatagar untuk bersama-sama pasukan Pranoto berangkat ke Fak-fak, tetapi ditengah perjalanan bertemu dengan pasukan Patroli Polisi Papua, namun tidak terjadi insiden apa-apa. Gerakan pasukan Hudaya Sumaryo diketahui oleh Marinir Belanda, namun pada waktu itu terjadi hujan deras sehingga jejak pasukan Hudaya Sumaryo hilang. Namun pasukan Marinir Belanda secara tak diduga bertemu dengan Pasukan Pelopor yang dipimpin oleh AIP II Pranoto. Dalam kontak senjata ini pasukan Belanda dapat dipukul mundur.</p> <p>Pasukan Belanda ini dalam gerakan mundurnya justru bertemu dengan kelompok Hudaya Sumarya. Akhirnya terjadi pertempuran besar pada tanggal 16 Agustus 1962. Ini adalah pertempuran terbesar yang dialami pasukan Pelopor. Dalam pertempuran ini pasukan Pelopor dapat memukul mundur pasukan Belanda sehingga mereka melarikan diri ke Soom. Dipihak Belanda mengalami kerugian 8 (delapan) orang tewas diantaranya</p>
--	---

	<p>komandan Kompinya yaitu Letnan Deveries dan Polisi Papua, bernama Ibrahim menderita luka berat. Setelah pertempuran diatas pasukan Pelopor dapat bergabung kembali, hal ini menimbulkan semangat baru untuk meneruskan gerakannya secara Gerilya menuju Fak-fak. Esok harinya tanggal 17 Agustus 1962 pasukan ingin merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan R.I. secara khusus.</p> <p>Caranya sesudah upacara pengibaran Bendera, AIP I Hudaya Sumaryo dengan membawa 45 anak buahnya menyerang dan memukul mundur Pos-pos pertahanan Belanda di daerah Rumbati. Sesudah berhasil menguasai Pos-pos tersebut, maka rakyat setempat menyambut pasukan Pelopor dengan meriah. Akhirnya Sang Merah Putih dapat dikibarkan di bumi Rumbati.</p> <p>Tiga hari kemudian tanggal 20 Agustus 1962 dua regu pasukan Belanda mendarat di Rumbati dan menanyakan dimana pasukan Hudaya Sumaryo berada. Hal ini dijawab oleh rakyat sesuai pesan Komandan Pelopor dengan menyebutkan “ada di atas “. Pasukan Belanda meminta rakyat untuk mengantarkannya, tetapi rakyat mengatakan tidak berani agar pasukan Belanda sendiri yang pergi kesana. Sejak saat itu pasukan Pelopor sudah melakukan konsolidasi dan menguasai Patipi, Soom, Tawar, Salapiti dan Rumbati. Sampai ada perintah berhenti tembak-menembak melalui siaran RRI. Beberapa hari kemudian datang seorang kurir dari Residen Belanda di Fak-fak yaitu De Boixs, maksudnya memberitahukan bahwa sudah dicapai perdamaian antara Indonesia dengan Belanda dengan utusan PBB.</p> <p>Hal ini disampaikan ke Induk Pasukan “boleh diterima “. Hari berikutnya datang sebuah kapal Destroyer dan dengan menggunakan sebuah perahu seorang penduduk asli Irian datang ke Pos Pasukan Pelopor sambil menyerahkan sepucuk surat yang ditanda tangani oleh Tentara PBB, yaitu Kapten Amadin dari Nigeria. Isi surat tersebut ajakan pihak Belanda kepada Komandan Pasukan R.I, agar datang ke kapal tanpa membawa senjata untuk mengadakan perundingan dengan Residen Belanda di Fak-fak.</p> <p>AIP I Hudaya Sumaryo yang saat itu sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Inspektur Polisi Tingkat II didampingi oleh Frans Datum Banua dan Solikhin, berangkat ke Fak-fak. Di daerah itu rakyat Fak-fak turut menyambut kedatangan Komandan Pasukan Pelopor yang dibanggakannya. Dengan tidak memperdulikan situasi, setelah IP II Hudaya Sumaryo menerima penghormatan dari Peleton Kawal Kehormatan Belanda, maka rakyat menyambut hangat dan meriah sampai ke halaman Residen Belanda. Dalam perundingan itu Residen Belanda melarang pengibaran Merah Putih, kalau tetap berkibar mungkin akan timbul keributan. Hal ini dijawab oleh Hudaya Sumarya bahwa justru apabila Merah Putih</p>
--	---

	<p>diturunkan akan terjadi keributan.</p> <p>Akhirnya diputuskan Bendera Merah Putih tetap dikibarkan di daerah-daerah yang dikuasai oleh Pasukan Hudaya Sumaryo, yang meliputi Rumbati, Taniu Patak, Tawar, Salakiti, Soom, Patipi dan Tanjung Fatagar. Dalam areal tersebut Belanda itu ditanggapi, di daerah yang telah dikuasainya itu kalau ada pihak Belanda datang tanpa memberitahu terlebih dahulu, pasukan Hudaya Sumarya juga tidak bertanggung jawab atas keselamatannya.</p> <p>Residen Belanda itu masih bertanya bagaimana caranya mengadakan hubungan antara Pasukan Induk dengan pasukan yang terpencil, apakah pasukan Hudaya Sumarya memiliki radio, jawab Hudaya Sumarya tidak ada. Akhirnya pasukan Hudaya Sumarya menerima 1 (satu) set alat perlengkapan radio untuk digunakan sebagai alat komunikasi, meskipun sebenarnya masih memiliki 1 (satu) set yang lain, demikianlah Merah putih berkibar di Rumbati. Setelah terjadi Persetujuan Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB New York, tanggal 15 Agustus 1962 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB bulan September 1962, maka Tentara Belanda ditarik mundur dari Fak-fak. Sedangkan yang tinggal disana hanya Perwiranya saja dan kemudian datang UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority), yaitu Badan Pemerintahan Sementara PBB dalam Pengawasan Tentara dari Pakistan.</p> <p>Dalam hubungan ini Korps Brigade Mobile menugaskan sejumlah Pasukan dan Pejabat untuk dipekerjakan pada UNTEA, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dua orang Perwira Menengah, Komisarisi Polisi Tk. I. V.E Karamoy dan Komisarisi Polisi Tk I H. Schiff diberangkatkan ke Irian Barat terhitung mulai bulan Oktober 1962. Enam Bintara Pelatih Brigade Mobile diberangkatkan ke Irian Barat dalam bulan Januari 1963. Satu Kompi Pelopor Brigade Mobile ditugaskan Irian Barat, terhitung mulai bulan Februari 1963. <p>Dari UNTEA waktu itu, seorang Kepala Polisi dari Inggris, 12 orang Perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, 18 (delapan belas) orang Perwira dari Philipina, 19 (sembilan belas) orang Perwira Polisi Belanda, 24 (dua puluh empat) orang Perwira Polisi Irian bersama kurang lebih 1.500 orang Bintara, terutama dari penduduk asli Irian. Komisarisi Polisi V.E Karamoy sejak Oktober 1962 telah bertugas sebagai Komandan Kepolisian Karasidenan (Police Devision Commander) sebagai salah satu Perwira Indonesia yang pertama kali diberikan kedudukan Pimpinan di Irian Barat.</p> <p>Secara perlahan-lahan Brigade Mobile mengatur strategi</p>
--	--

	<p>pengamanan agar tidak timbul bentrokan-bentrokan dengan Pihak UNTEA, maupun Polisi-polisi Irian ciptaan Belanda. Baru pada akhir Mei 1963 Kepala Kepolisian dengan jalan mengambil langkah untuk melancarkan serah terima kekuasaan dari Pemerintahan UNTEA kepada Republik Indonesia. Kebijaksanaan yang diambil pada waktu itu berdasarkan perintah-perintah Pusat ialah segera menguasai serta melucuti Anggota-anggota Polisi Irian Jaya. Mereka ini tadinya dipersiapkan Belanda untuk memberontak/melawan Pemerintah R.I. Berdasarkan struktur Pemerintah UNTEA, maka Kepala Polisi Karesidenan memegang peranan penting serta menentukan dalam Bidang Keamanan, karean waktu itu berlakunya tertib sipil yang kebetulan juga Kepala Polisi Karesidenan ini adalah Wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini banyak sekali propaganda Belanda berupa isu-isu politik yang bersifat suversif maupun bom-bom waktu ditengah masyarakat Irian untuk mengacaukan keadaan serta ingin menimbulkan pembrontakan melawan Republik Indonesia. Usaha-usaha Belanda ini memang sudah diperhitungkan terlebih dahulu, sehingga dapat dicegah.</p> <p>Begitu lancarnya Operasi Angkatan Bersenjata R.I, maka menjelang tanggal 1 Maret 1963 berlangsunglah serah terima kekuasaan atas Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia secara damai, aman dan tertib, dengan demikian pada tanggal 4 dan 5 Mei 1965 Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk pertama kalinya berkenan menginjak bumi Irian Barat yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semuanya ini dapat terlaksana berkat kerja sama yang erat antara warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Maluku (Perbatasan Irian Barat), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia telah berjalan dengan lancar, aman dan damai sesuai harapan Pemerintah R.I.</p> <p>Sementara itu pasukan Detasemen Pelopor Brimob dibawah pimpinan I.P. II Hudaya Sumarya melakukan tugas teritorial dengan mendirikan Sekolah Dasar di Rumbati, Sekolah Agama dan Sekolah Dasar di Fak-fak, dan guru-gurunya diambil dari pasukan IP II Hudaya Sumarya. Perlu diketahui bahwa Inspektur Polisi II Hudaya Sumarya adalah Komandan Detasemen, yang dipersiapkan oleh Angkatan Bersenjata R.I. Setelah para gerilyawan itu kumpul di Biak selanjutnya dikirim ke Induk kesatuan masing-masing di Jawa.</p>
--	---

8. Sejarah Polri pada Masa Operasi Dwikora

Dwikora adalah merupakan suatu manifestasi daripada keberanian dan kesanggupan Bangsa Indonesia untuk menghadapi kaum Neo Kolonialisme secara mental dan fisik. Hal ini dilatar belakangi oleh Penbentukan Negara Boneka Malaysia yang dipaksakan oleh Inggris, yang rencananya akan dijadikan sebagai Pangkalan Militer untuk memelihara perdamaian dan kestabilan wilayah ditentang oleh Presiden Soekarno, dengan mengatakan yang berkepentingan atas perdamaian dan kestabilan wilayah Asia, adalah Bangsa Asia sendiri. Karena adanya Pangkalan Militer Asing di wilayah Asia justru menimbulkan pertentangan diantara Bangsa-bangsa Asia. Pangkalan Militer itu diumpamakan laksana “ Bom Waktu “ yang bisa meledak setiap saat.

Dwikora ini merupakan perintah Presiden Reublik Indonesia yang diucapkan dalam pidato resmi tanggal 3 Mei 1964 dihadapan Apel Besar Sukarelawan di Jakarta. Adapun isi Dwikora adalah Perhebat Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia buatan Inggris.

Berdasarkan perintah Presiden tersebut, maka pimpinan Kepolisian Negara mengeluarkan Surat Keputusan Menpangak No. Pol. : 11/SK/MK/1964 tanggal 21 Oktober 1964 dibentuk satuan tugas dari Korps Brimob yang tergabung dalam Brigade V Mandau dipimpin oleh AKBP Daryono Warsito. Brigade V Mandau ini merupakan gabungan dari Batalyon-batalyon Brimob Jateng, Jabar, Sumatera Selatan, Maluku dan Resimen Pelopor.

Dalam Brigade Mandau ini terdiri atas 3 (tiga) Batalyon, yaitu: Yon I dipimpin oleh AKP Ali Legowo, Yon II dipimpin oleh AKP H.T. Sihombing, Yon III dipimpin oleh AKP R.S Djamari. Disamping itu juga dibentuk 3 (tiga) Kompi Khusus, yaitu ; Ki Pelopor dipimpin oleh IPTU Kasman Arief, Ki Senjata Berat dipimpin oleh IPDA Patenengan dan Ki PKL dipimpin oleh IPDA Saim Effendi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menpangak No. Pol. : 1027/SO/IV/64/Pangak, tanggal 20 Desember 1964 terhitung mulai tanggal 5 Desember 1964, 1 (satu) Kompi D Yon 1232 Resimen Pelopor menunaikan tugas Operasi Dwikora. Pasukan ini dipimpin oleh IP I N.A. Titay, berangkat menuju Pulau Bintan / Tanjung Pinang. Berikutnya berdasarkan Perintah Lisan Komandan Basis Z Ops. “ A “

KOTI tanggal 24 Februari 1965 mulai tugas pokoknya, yaitu infiltrasi ke daratan Malaysia. Gerakan infiltrasi ini dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.

Infiltrasi pertama dipimpin oleh IPDA J. Soepardi bergerak menuju sasaran dengan perahu kecil yang dilengkapi dengan mesin

	<p>Johnson. Infiltrasi kedua dipimpin oleh Brigadir Pol. Soetadi dan Agen Pol. Ojo Tarjono. Kemudian menyusul infiltrasi ketiga dipimpin oleh Brigadir Pol. Suyatmin. Tidak lama kemudian dibawah pimpinan Ajun Brigadir Pol Tobaki dilakukan infiltrasi ke empat. Pada penyusupan berikutnya (V) sebagai Komandan Tim adalah Brigadir Pol Amjiatak gugur dimedan perang setelah terjadi kontak senjata dengan pasukan musuh. Sebagai Komandan Kompi IP I N.A. Titallay berangkat bersama pasukannya menyeberangi selat Malaka untuk menerobos patroli-patroli musuh.</p> <p>Dari beberapa penyusupan yang dilakukan oleh Resimen Pelopor, Tim yang dipimpin oleh Brigadir Soetadi melakukan gerilya di hutan-hutan Malaysia. Selama bergerilya telah gugur Agen Polisi Dua M. Rijanto dan satu tertangkap yaitu AP II Leim Ngo Hwua dan 2 (dua) hilang masing-masing Hamzah dan Jamansi (Sukwan). Akhirnya setelah bergerilya kurang lebih sebulan pasukan kita tertangkap oleh Special Brand Police (Police Malaysia) pada tanggal 27 Maret 1965. Selanjutnya diajukan ke sidang Pengadilan untuk dihukum gantung. Tetapi berkat penyelesaian politik yang cepat antara Negara Indonesia dan Malaysia, sehingga terhindarlah dari hukum maut tersebut.</p> <p>Dengan berakhirnya penugasan Resimen Pelopor Yon 1232, maka Kompi ini berarti telah meninggalkan anggota-anggotanya di daerah Malaysia sebanyak 1 (satu) peleton yang gugur dalam rangka melakukan Opsai Dwikora sebagai bunga-bunga Bangsa dalam pengabdianya kepada Negara.</p> <p>Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin: Dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dapat diambil nilai kejuangan dari para pendahulu Polri yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sikap rela berkorban; Sikap membangun kerjasama; Sikap cinta tanah air; Sikap pantang menyerah.
--	---



RANGKUMAN

1. Penumpasan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pada akhir tahun 1949 Jaksa Agung NIT (Negara Indonesia Timur), Seumokil menjatuhkan Hukuman Tembak kepada seorang Pejuang Sulawesi Selatan, yaitu Robert Wolter Monginsidi. Peristiwa ini kemudian meluas dengan adanya tindakan APRA menghabisi rekan-rekan Wolter Monginsidi di Sulawesi Selatan.
2. Penumpasan Gerakan Andi Azis, Andi Azis adalah seorang Perwira Tentara KNIL bekas didikan Belanda dan ditugaskan di Sulawesi Selatan. Pada masa kemerdekaan, Andi Azis diterima untuk bergabung kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan pangkat Kapten.
3. Penumpasan Gerakan DI / TII yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain DI / TII Jawa Barat, DI / TII di Aceh, DI / TII di Sulawesi dan DI / TII di Maluku.
4. Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Ferry Seoumokil setelah menjatuhkan vonis hukuman tembak terhadap Robert Wolter Monginsidi di kecam oleh para politisi di Sulawesi Selatan. Mengingat posisinya sebagai Jaksa Agung Negara Indonesia Timur semakin terjepit, akhirnya Seoumokil melarikan diri ke Maluku dan mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS).
5. Penumpasan PRRI / Permesta yang berada di wilayah Indonesia antara lain PRRI Sumatra, PRRI Maluku, PRRI di Sulawesi, PRRI Cikini.
6. Operasi Trikora, Trikora adalah Tri Komando Rakyat yang berisi Perintah-perintah Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961, yaitu membebaskan Irian Barat dari tangan Kolonial Belanda.
7. Pertempuran-pertempuran dengan Pihak Belanda. Detasemen Pelopor setelah selesai mendarat di Tanjung Fatagar segera mengadakan konsolidasi dan orientasi medan serta menyiapkan alat komunikasi Pesawat GRC 9. Segera diadakan komunikasi dengan Induk Pasukan di Gorom dan Ambon untuk melaporkan hasil misi penyeberangan tersebut.
8. Operasi Dwikora, Dwikora adalah merupakan suatu manifestasi daripada keberanian dan kesanggupan Bangsa Indonesia untuk menghadapi kaum Neo Kolonialisme secara mental dan fisik. Hal ini dilatar belakangi oleh Penbentukan Negara Boneka Malaysia yang dipaksakan oleh Inggris.

**LATIHAN**

1. Jelaskan sejarah Polri pada penumpasan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)!
2. Jelaskan sejarah Polri pada penumpasan gerakan Andi Azis!
3. Jelaskan sejarah Polri pada penumpasan gerakan DI/TII!
4. Jelaskan sejarah Polri pada penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)!
5. Jelaskan sejarah Polri pada penumpasan PRRI/PERMESTA!
6. Jelaskan sejarah Polri pada masa operasi Trikora!
7. Jelaskan sejarah Polri pada pertempuran-pertempuran dengan pihak Belanda!
8. Jelaskan sejarah Polri pada operasi Dwikora!

Modul**03****INTEGRASI POLRI KE DALAM ABRI
DAN MASA ORDE BARU****2 JP (90 Menit)****PENGANTAR**

Dalam bahan ajar ini dibahas tentang sejarah integrasi Polri ke dalam ABRI, sejarah Polri pada masa penumpasan G30S/PKI di Jakarta, sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di Jawa Tengah dan sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di luar Jawa.


Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami masa integrasi Polri ke dalam ABRI dan sejarah polri pada masa orde baru.


**KOMPETENSI DASAR**


Memahami masa integrasi Polri ke dalam ABRI dan sejarah polri pada masa orde baru.


Indikator hasil belajar:

1. Menjelaskan sejarah Integrasi Polri ke dalam ABRI;
2. Menjelaskan sejarah Polri pada masa penumpasan G30S/PKI di Jakarta;
3. Menjelaskan sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di Jawa Tengah;
4. Menjelaskan sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di luar Jawa.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok bahasan: Masa integrasi Polri ke dalam ABRI dan Polri pada masa orde baru.</p> <p>Sub pokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Integrasi Polri ke dalam ABRI; 2. Sejarah Polri pada masa penumpasan G30S/PKI di Jakarta; 3. Sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di Jawa Tengah; 4. Sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di luar Jawa.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang masa integrasi Polri ke dalam ABRI dan sejarah polri pada masa orde baru. 2. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 3. Metode game dengan EL (<i>Experiential Learning</i>) Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai, inspirasi dan terobosan dalam kegiatan terstruktur. 4. Metode NLP (<i>Neuro Linguistic Programming</i>) Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (<i>neuro</i>) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (<i>linguistic</i>) yang dilakukan secara berulang-ulang (<i>programming</i>). 5. Metode diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan tentang masa integrasi Polri ke dalam ABRI dan sejarah polri pada masa orde baru. 6. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang diberikan.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>; b. Laptop; c. <i>LCD</i>. d. Peta wilayah. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas Flipchart. b. Alat tulis. 3. Sumber belajar:

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi; b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi sejarah polri pada masa orde baru dan masa Integrasi Polri ke dalam ABRI; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; e. Pendidik membagi peserta menjadi empat kelompok diawali dengan bernyanyi; f. Pendidik mengawasi jalannya diskusi g. Masing-masing ketua kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi kelompok lainnya;

	<p>h. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi dari masing-masing kelompok.</p> <p>3. Tahap akhir: 10 Menit</p> <p>a. penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bias diambil dari pembelajaran yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</p>
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> Pendidik menugaskan peserta didik meresmum materi yang telah diberikan. Pendidik memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok mendiskusikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> Pok 1 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada masa penumpasan G30S/PKI di Jakarta; Pok 2 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di Jawa Tengah; Pok 3 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di luar Jawa; Pok 4 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat Tentang sejarah Integrasi Polri ke dalam ABRI

**BAHAN BACAAN**

INTEGRASI POLRI KEDALAM ABRI DAN MASA ORDE BARU

1. Sejarah Integrasi Polri ke dalam ABRI

Dalam kurun waktu antara tahun 1950-1960, status Kepolisian di bedakan oleh beberapa Lembaga Negara. Pamong Praja menghendaki status Polisi dikembalikan ke Departemen Dalam Negeri, dengan alasan demi kelancaran Pemerintah. Kejaksaan Agung berpendapat, bahwa penegakan Hukum akan lebih efektif apabila Jaksa Agung memegang pimpinan tertinggi atas Kepolisian represif dan preventif. Menteri Kehakiman Mr. Djodi Gondokusumo dalam Kabinet Ali Wongso tahun 1953, bermaksud mengubah status Polisi, dengan memecahnya menjadi tiga, yaitu Polisi Represif dimasukkan ke Departemen Kehakiman. Polisi Prefentif dimasukkan Departemen Dalam Negeri dan Brigade Mobile ke Departemen Pertahanan.

Status Kepolisian kemudian menjadi jelas ketika ditetapkan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata. Ketetapan MPRS tersebut kemudian dipertegas dengan Penetapan DPRGR, tanggal 19 Juni 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13/1961. Pasal 3 Undang-undang Pokok Kepolisian NO. 13 tahun 1961 menyatakan, bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Sejak dikeluarkannya Ketetapan MPRS dan UU Pokok Kepolisian, maka status Kepolisian tidak diperdebatkan lagi. Akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang No. 13 tahun 1961 disebutkan bahwa status Kepolisian antara Sipil dan Militer.

Penjelasan itu menjadikan Integrasi Kepolisian kedalam Angkatan Bersenjata masih setengah-setengah. Pada tahun 1964 berdasarkan Keputusan Presiden No. 290 tahun 1964 yang disempurnakan tanggal 23 Juli 1965, Angkatan Kepolisian di Integrasikan dengan unsur-unsur ABRI lainnya, yaitu Angkatan Darat, Laut dan Udara, sehingga kedudukan Hukum, Personil, Materiil, Keuangan, Organisasi, Administrasi dan Perawatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur secara umum dan terintegrasi.

Dalam keputusan-keputusan diatas disebutkan bahwa, Presiden adalah Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata. Dengan organisasi demikian Presiden dapat langsung berhubungan dengan Pimpinan Angkatan, di luar sepengetahuan koordinator Pertahanan Keamanan yang hanya menangani tugas administrasi

saja dan itupun terbatas hanya dalam segi koordinasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya situasi desintegrasi, karena ada persaingan antara Angkatan yang satu dengan yang lain. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, pimpinan ABRI berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan melalui pendekatan mental, doktrin dan organisasi.

2. Sejarah Polri pada Masa Penumpasan G30S/PKI di Jakarta

Segera setelah G.30 S/PKI meletus, Menteri/Pangak Irjen Pol. Sucipto Yudodiharjo mengumumkan sikap dan ketegasan Polri kepada seluruh pimpinan dan warga Polri serta rakyat Indonesia melalui sebuah Radiogram tanggal 1 Oktober 1965 itu, juga berisi penyangkalan Irjen Pol. Sucipto Yudodiharjo, bahwa tidak benar ia duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia dan tidak tahu menahu tentang tercantum namanya dalam Dewan Revolusi tersebut, serta seruan kepada segenap warga Polri agar turut serta memulihkan keadaan.

Pada saat meletusnya pemberontakan G.30 S/PKI ada seorang anggota Polri yang bernama Ajun Inspektur Polisi dua anumerta karel satsuit tubun yang meninggal di jakarta 1 oktober 1965 karena ditembak oleh pemberontak pada saat menjaga kediaman J.Leimena. ia dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata, Jakarta. Dikarenakan dia adalah korban gerakan 30 september maka dia diangkat menjadi seorang pahlawan Revolusi bersama dengan Jenderal A. Yani, Letjen R. Suprpto, Letjen M.T. Haryono, Letjen S. Parman, Mayjen Sutoyo, Mayjen D.I. Panjaitan, Brigjen Katamso, Kol Sugiono dan kapten CZI Pierre Tendean. Selain itu pula pangkatnya dinaikkan menjadi Ajun Inspektur Dua Polisi. Namanya juga kini diabadikan menjadi nama sebuah Kapal Perang Republik Indonesia dari fregat kelas Ahmad Yani dengan nama KRI Karel Satsuitubun.

Karel Satsuit Tubun atau disebut juga K.S Tubun merupakan salah satu pahlawan revolusi, pahlawan yang ikut menjadi korban G30SPKI pada 1965. Dia dilahirkan di Tual, Maluku Tenggara tanggal 14 Oktober 1928. Karel Satsuit Tubun dijadikan Pahlawan Revolusi pada 5 Oktober 1965 dengan Keppres No. 114/KOTI/1965.

Karir Anggota Polri

Polisi Brimob Pangkat Agen polisi Kelas Dua

Polisi Brimob pangkat Agen Polisi kelas satu

Polisi Brimob Brigadir Polisi pangkat ajun Inspektur Dua Polisi



ketegasan Pimpinan Polri tersebut menjelma dalam kebulatan tekad dari para Panglima Angkatan dalam ABRI (AD, AL, dan AK) yang masih dipercaya sebagai tampuk pimpinan Komando. Pada siang harinya, masih tanggal 1 Oktober 1965 disusun pengumuman tentang adanya kerjasama AD, AL dan AK untuk menumpas pemberontakan G.30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut pada tanggal 15 Oktober 1965 Pimpinan Polri mengadakan Sidang Staf Umum Departemen Angkatan Kepolisian. Isi briefing tersebut, antara lain : Penegasan Menpangak Bahwa G.30 S/PKI adalah suatu pengambil alihan kekuasaan (*Coup*) dan merupakan Gerakan Kontra Revolusi. Untuk itu Polri perlu mendukung pemulihan keamanan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk dari Komando Pemulihan Keamanan yang dipertanggung jawabkan kepada Pangkostrad.

Polri ikut berjasa dalam penumpasan pemberontakan G.30 S/PKI tahun 1965. Salah seorang anggota polisi bernama, Agen Polisi Tingkat II Soekitman telah berjasa membantu mengungkap tragedi Nasional tersebut. Saat itu Agen Polisi Tingkat II Soekitman sedang menjalankan tugas patroli. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang diikuti rentetan letusan senjata, Kemudian ia bergegas menghampiri sumber suara dengan menggunakan sepeda kumbangnya ke arah kediaman Jenderal DI Panjaitan di jalan IskandarSyah Jakarta Selatan. Namun, sekelompok orang menghadang dan menculiknya. Agen Polisi Tingkat II Soekitman ikut dibawa ke Lubang Buaya menjadi salah satu saksi penculikan dan pembunuhan beberapa pemimpin TNI dalam Peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Agen Polisi Tingkat II Soekitman adalah penemu lokasi pembuangan jenazah para jenderal Pahlawan Revolusi Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Kemudian atas jasa-jasanya beliau dianugerahi:

- a. Pada tahun 1967 mendapat Satyalencana Jana Utama, Wira Darma dan Panca Warsa ke I.
- b. Pada tahun 1968 mendapat Satya Lencana Penegak.
- c. Mendapatkan kenaikan pangkat dari AKP menjadi AKBP.
- d. pada 13 Agustus 2007 beliau wafat di usia 64 tahun di makamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta dengan upacara militer.



Sukitman lahir di Desa Cimanggu, pelabuhan ratu Jawa barat. Di usia 18 tahun, Soekitman merantau ke Jakarta dan lulus ujian seleksi masuk Sekolah Polisi Negara kramat jati jakarta timur pada 1961. Siswa Angkatan VII SPN kramat jati ini menyelesaikan pendidikannya pada Januari 1963 dan dilantik menjadi Agen Polisi Tingkat II. Ia pun memulai karir sebagai polisi di Markas Polisi Seksi VIII kebayoran, jakarta, sebagai anggota perintis dari Kesatuan Perintis/Sabhara. Sukitman berpangkat Sersan Mayor pada tahun 1980 dan bertugas sebagai anggota Detasemen Patroli Pengawal (Den Patwal) atau Brigade Motor, Soekitman terakhir berdinasi di kepolisian selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Regiden Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, dan pensiun pada 1998.

Berikutnya pada tanggal 16 Oktober 1965 berhasil disusun rumusan lengkap dalam pedoman politik Polri dan Pedoman Operasi Pembinaan Masyarakat dalam menanggulangi G.30 S/PKI. Pedoman tersebut didasarkan pada :

- a. Pancasila serta Doktrin pelaksanaannya yaitu: Sapta Marga, Tri Brata.
- b. Doktrin Polri: Tata Tentram Kerta Raharja.
- c. Penetapan Presiden No.7/1959, Penetapan Presiden

	<p>No.11/1961, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan lain dari Peperda.</p> <p>d. Briefing Penegasan Menpangak tanggal 15 Oktober 1965.</p> <p>3. Sejarah Polri pada Masa Penumpasan PKI di Jawa Tengah</p> <p>Di daerah-daerah situasinya juga memanas termasuk di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.00 WIB di Hotel Daha terjadi penculikan terhadap Komandan Kodim setempat dan Stafnya. Hal serupa juga dialami oleh Komandan CPM dan Komandan Brigif 6 - Surakarta yang dilakukan oleh PKI. Kejadian tersebut diketahui oleh Komandan Polisi Sudiatmo dan AKP Sutiyo yang sedang melakukan Patroli keliling kota, selanjutnya hal itu dilaporkan kepada atasannya.</p> <p>Pada tanggal 2 Oktober 1965 Polisi mendapat undangan dari Letkol Iskandar guna membentuk Dewan Revolusi daerah Surakarta, tetapi undangan tersebut ditolak oleh Komandan Polisi setempat yang telah mengetahui gelagat yang tidak baik. Sehari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Pasukan Polisi memantau adanya pertemauan antara pendukung Dewan Revolusi. Walikota Surakarta dan Komandan Lanud Panasan, Pembantu Gubernur untuk Surakarta dengan D.N Aidit Gembong PKI di Loji Gandrung. Hari-hari berikutnya mulai diadakan patroli-patroli dalam kota lebih intensif yang diperkuat dengan pasukan-pasukan tempur disamping pasukan Brimob Diklat Tawangmangu. Bahkan dalam situasi yang genting itu koantor-kantor Polisi dijadikan Pusat Komando Pemerintahan sampai keadaan pulih kembali.</p> <p>Pada tanggal 21 Oktober 1965 terjadi Pemogokan Serikat Buruh Kereta Api Balapan-Surakarta. Namun pimpinan Kepolisian Surakarta Komisaris Polisi Drs. Sarwono masih berhasil melokalisasi agar tidak meluas, sambil mempercepat kedatangan RPKAD yang masih di Magelang. Sehari kemudian tanggal 22 Oktober 1965 malam terjadi pembunuhan terhadap 9 (sembilan) pemuda oleh orang-orang PKI di Kedungkopi (tepi Bengawan Solo). Kemudian Polisi bersama-sama Pemuda Non PKI mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang PKI dan dikumpulkan di balai kota yang dijaga RPKAD, selanjutnya untuk diproses hukum.</p> <p>Dalam suatu penyelidikan Polisi Resort 951 Surakarta berhasil menemukan dokumen-dokumen PKI tentang keterlibatan Walikota, Utomo Ramelan dalam Gerakan PKI. Di Boyolali tanggal 1 Oktober 1965 PKI membentuk Dewan Revolusi di Karanggeneng, sehari kemudian disusul datangnya tokoh-tokoh PKI Lukman, Nyoto Suyono Atmo dan bekas bupati Boyolali Suali dan disusul Kolonel Sakirman, tujuan mempersiapkan penyerbuan</p>
--	--

ke kota Boyolali dan mengadakan penculikan. Polisi bersama ABRI dan masyarakat berhasil menggagalkan serangan tersebut, tetapi PKI sudah berhasil menculik 32 (tiga puluh dua) orang yang sebagian sudah dibunuh. Tanggal 24 Oktober 1965 Polisi berhasil menggagalkan serangan PKI terhadap Asrama Polisi di Sunggingan dan menangkap 62 orang PKI serta Mantan Bupati Boyolali, yaitu Suali. Disamping itu dirampas pula 52 pucuk senjata berat dan ringan serta 2 (dua) buah granat tangan. Dalam pengejaran Polisi juga menangkap ex Letkol Usman, ex Letkol Sakiman, ex Mayor Raharja, ex Kapten Sakirno, ex Mayor Maryono, ex Peltu Sukijan Sudiyono, ex Kepala Kantor Otonom Boyolali, Tukul, Slamet (Tokoh Pemuda PKI).

Di Sukoharjo Polisi bersama ABRI mengadakan penyelidikan terhadap orang-orang PKI. Tanggal 27 Oktober 1965 atas petunjuk Polisi, RPKAD telah menangkap 16 orang Anggota Kodim 0726 Sukoharjo dan diamankan. Pada tanggal itu juga Sektor Polisi Weru menangkap 8 orang PKI pelarian dari Wonogiri, hari berikutnya Polisi Sektor Tawang Sari menangkap 3 orang PKI dari Klaten. Tanggal 1 Nopember 1965. Polisi Sektor Sukoharjo bersama Yon 6 menangkap 125 simpatisan PKI untuk diproses secara Hukum. Tanggal 16 Nopember 1965 Polisi Sektor Grogol berhasil menangkap Badri, karena membunuh Anggota Polisi Komres 951 Surakarta, sedangkan sehari sebelumnya ditemukan 12 pucuk Senjata Api Otomatis dan 7 Granat Tangan, 524 butir peluru.

Di daerah Klaten aksi PKI juga merajalela, yaitu dengan mengadakan pembunuhan-pembunuhan musuh-musuh politiknya. Kekuatan PKI bermaksud untuk menguasai dan merebut senjata Komando Pendidikan 1 F5 Angkatan Darat di daerah Wedi. Di dalam Lembaga Pendidikan AD itu terdapat kurang lebih senjata untuk kekuatan 2 (dua) Batalyon. Maka apabila PKI berhasil merebut Dodik 1 F5 tersebut, tentu dapat menghancurkan kota Klaten, akan tetapi rencana PKI itu telah tercium oleh Polisi dan dapat menangkap beberapa oknum PKI yang merencanakan perebutan Dodik 1 F5 tersebut. Bersamaan dengan merebut Dodik 1 F5 tersebut PKI mengadakan gerakan-gerakan kantong gombyok, pengrusakan-pengrusakan dan usaha mengepung kota Klaten secara total. Namun Kepolisian Resort 953 Klaten dibawah Pimpinan Danres Ashmad Isnadi berhasil mencium rencana-rencana busuk PKI tersebut. Akhirnya Polisi bersama-sama gerakan masyarakat Anti PKI berhasil menumpas pemberontakan PKI.

4. Sejarah Polri pada Masa Penumpasan PKI di Luar Jawa

Di Sulawesi Selatan pembersihan sisa-sisa PKI pimpinan Markus Giroth telah ditangkap pada tanggal 11 Juli 1967 di Ujung Pandang. Kemudian diikuti penangkapan terhadap para pengikutnya untuk dilakukan proses Hukum. Dalam hal ini Kepolisian Daerah setempat mempunyai andil besar dalam melakukan pemeriksaan dan persidangan tokoh-tokoh PKI tersebut. Dengan diangkatnya AKBP Drs. Hadi Rahmat (Asisten Bidang Intel) Komdak XVIII Sulseltra diangkat sebagai Hakim Anggota dan Komisaris Polisi Hendro Kusumo sebagai Hakim Anggota Pengganti serta IP I M. Saleh, SH. sebagai Panitera.

Di Sulawesi Tenggara Komres 1863 Buton, dipimpin AKP I Made Rupeg bersama unsur ABRI mengadakan penumpasan terhadap sisa-sisa PKI dan berhasil menangkap Bupati Moh. Kasim dan sejumlah Pegawai Negeri yang diidentifikasi sebagai Anggota PKI. Tetapi dalam perkembangan waktu ternyata Moh. Kasim tidak terlibat dalam Gerakan PKI tersebut, sehingga namanya direhabilitasi kembali.

Situasi politik di Ibukota Negara Jakarta setelah tragedi G.30S/PKI menjadi semakin panas. Mahasiswa dan masyarakat umum mengajukan Tiga Tuntutan (Tritura) agar Presiden membubarkan PKI, menurunkan harga-harga dan membubarkan Kabinet Gestapu yang nyata-nyata dikuasai PKI. Menanggapi hal itu Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan, tetapi hal itupun ditolak mahasiswa.

Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Mayjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap keamanan Ibukota Jakarta. ABRI akhirnya memandang perlu untuk menyerap aspirasi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang pembubaran PKI dan dinyatakan sebagai Partai Terlarang di seluruh wilayah Indonesia.


Nilai-nilai kejuangan Polisi yang terkandung dalam Integrasi Polri kedalam ABRI dan sejarah pada masa orde Baru:

- a. Kesetiaan Polri terhadap Negara diuji ketika terjadi isu bahwa Polri terlibat dalam dewan Refolusi rekayasa PKI.
- b. Integrasi Polri kedalam ABRI merupakan bentuk Loyalitas yang tinggi dalam menjalin kerja sama.
- c. Semangat juang yang tetap tinggi dalam memberantas setiap kejahatan yang berusaha merongrong kewibawaan Negara.



RANGKUMAN

1. Sejarah Integrasi Polri ke dalam ABRI, Status Kepolisian kemudian menjadi jelas ketika ditetapkan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata. Ketetapan MPRS tersebut kemudian dipertegas dengan Penetapan DPRGR, tanggal 19 Juni 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13/1961. Pasal 3 Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13 tahun 1961 menyatakan, bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Sejak dikeluarkannya Ketetapan MPRS dan UU Pokok Kepolisian, maka status Kepolisian tidak diperdebatkan lagi. Akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang No. 13 tahun 1961 disebutkan bahwa status Kepolisian antara Sipil dan Militer.
2. Sejarah Polri Pada Masa Penumpasan G30S/PKIdi Jakarta. Segera setelah G.30 S/PKI meletus, Menteri/Pangak Irjen Pol. Sucipto Yudodiharjo mengumumkan sikap dan ketegasan Polri kepada seluruh pimpinan dan warga Polri serta rakyat Indonesia melalui sebuah Radiogram tanggal 1 Oktober 1965 itu, juga berisi penyangkalan Irjen Pol. Sucipto Yudodiharjo, bahwa tidak benar ia duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia dan tidak tahu menahu tentang tercantum namanya dalam Dewan Revolusi tersebut, serta seruan kepada segenap warga Polri agar turut serta memulihkan keadaan.
3. Sejarah Polri Pada Masa Penumpasan PKI di Jawa Tengah Di daerah-daerah situasinya juga memanas termasuk di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, Pada tanggal 2 Oktober 1965 Polisi mendapat undangan dari Letkol Iskandar guna membentuk Dewan Revolusi daerah Surakarta, tetapi undangan tersebut ditolak oleh Komandan Polisi setempat yang telah mengetahui gelagat yang tidak baik.
4. Sejarah Polri Pada Masa Penumpasan PKI di Luar Jawa Di Sulawesi Selatan pembersihan sisa-sisa PKI pimpinan Markus Giroth telah ditangkap pada tanggal 11 Juli 1967 di Ujung Pandang. Di Sulawesi Tenggara Komres 1863 Buton, dipimpin AKP I Made Rupeg bersama unsur ABRI mengadakan penumpasan terhadap sisa-sisa PKI dan berhasil menangkap Bupati Moh. Kasim dan sejumlah Pegawai Negeri yang diidentifikasi sebagai Anggota PKI.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan sejarah Integrasi Polri ke dalam ABRI!2. Jelaskan sejarah Polri pada masa penumpasan G30S/PKI di Jakarta!3. Jelaskan sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di Jawa Tengah!4. Jelaskan sejarah Polri pada masa penumpasan PKI di luar Jawa!

Modul
04


SEJARAH POLRI PADA MASA ERA REFORMASI DAN POLRI MANDIRI



4 JP (180 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam bahan ajar ini dibahas tentang sejarah Polri pada masa era reformasi dan sejarah Polri pada masa Polri mandiri.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami sejarah Polri pada masa era reformasi dan pada masa Polri mandiri.</p>

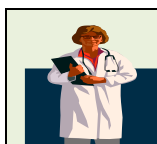
	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami sejarah Polri pada masa era reformasi dan pada masa Polri mandiri.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sejarah Polri pada masa era reformasi; 2. Menjelaskan sejarah Polri pada masa Polri mandiri; 3. Menjelaskan Pemekaran Polda dan Polres; 4. Menjelaskan Hubungan Polri terhadap TNI dan Pemda membangun Bangsa.

	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok bahasan:</p> <p>Sejarah Polri pada masa era reformasi dan pada masa Polri mandiri.</p> <p>Sub pokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Polri pada masa era reformasi; 2. Sejarah Polri pada masa Polri mandiri; 3. Pemekaran Polda dan Polres; 4. Hubungan Polri terhadap TNI dan Pemda dalam membangun Bangsa.

	METODE PEMBELAJARAN
	<p>1. Metode ceramah</p> <p>Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Sejarah Polri pada masa era reformasi dan pada masa Polri mandiri.</p>
	<p>2. Metode tanya jawab</p> <p>Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan.</p>
	<p>3. Metode game dengan EL (<i>Experiential Learning</i>)</p> <p>Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai, inspirasi dan terobosan dalam kegiatan terstruktur.</p>
	<p>4. Metode NLP (<i>Neuro Linguistic Programming</i>)</p> <p>Metode ini digunakan untuk mengaktifkan otak sadar dan otak bawah sadar (<i>neuro</i>) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (<i>linguistic</i>) yang dilakukan secara berulang-ulang (<i>programming</i>).</p>
	<p>5. Metode diskusi</p> <p>Metode ini digunakan untuk mendiskusikan tentang Sejarah Polri pada masa era reformasi dan pada masa Polri mandiri.</p> <p>6. Metode penugasan</p> <p>Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang diberikan.</p>

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<p>1. Alat/media:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>White board</i>; Laptop; <i>LCD</i>. Peta wilayah.
	<p>2. Bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kertas Flipchart. Alat tulis. <p>3. Sumber belajar:</p>

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi; b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi sejarah Polri pada masa era reformasi dan pada masa Polri mandiri; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; e. Pendidik membagi peserta menjadi empat kelompok diawali dengan bernyanyi; f. Pendidik mengawasi jalannya diskusi; g. Masing-masing ketua kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi kelompok lainnya; h. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 3. Tahap akhir: 10 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bias diambil dari pembelajaran yang disampaikan. d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume. 4. Tes Sumatif: 90 Menit

**TAGIHAN/TUGAS**

Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

**LEMBAR KEGIATAN**

1. Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.
2. Pendidik memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok mendiskusikan tentang:
 - a. Pok 1 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam sejarah Polri pada masa era reformasi.
 - b. Pok 2 membahas tentang menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam sejarah Polri pada masa Polri mandiri.
 - c. Pok 3 membahas tentang Pemekaran Polda dan Polres.
 - d. Pok 4 membahas tentang Hubungan Polri terhadap TNI dan Pemda dalam membangun Bangsa.

**BAHAN BACAAN**

SEJARAH POLRI PADA MASA ERA REFORMASI DAN POLRI MANDIRI

1. Sejarah Polri Pada Masa Era Reformasi

Sejak bulan Juli 1997, Indonesia dilanda krisis Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Awal tahun 1998, situasi politik semakin panas sebagai akibat dari krisis ekonomi berkepanjangan.

Mahasiswa di Jakarta maupun beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, melakukan mimbar bebas. Mereka menyuarakan keprihatinan akibat krisis ekonomi dan menuntut penurunan harga Sembilan Bahan Pokok (sembako) serta menindak mereka yang melakukan pembunuhan. Sejak Sidang Umum dan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII, aksi unjuk rasa mahasiswa semakin meningkat. Mereka menolak pidato pertanggung jawaban Presiden karena dianggap tidak menyinggung penyebab krisis ekonomi dan upaya-upaya konkrit Pemerintah untuk menanggulangnya. Selain itu Kabinet Pembangunan VII yang dibentuk dianggap tidak kredibilitas, karena sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).



Pada tanggal 12 Mei 1998, Mahasiswa Trisakti mengadakan aksi mimbar bebas di halaman kampusnya. Mimbar bebas yang dihadiri ribuan mahasiswa berjalan baik dan damai. Setelah mimbar bebas selesai Mahasiswa berusaha bergerak keluar kampus menuju ke Gedung DPR/MPR. Gerakan mahasiswa ke Gedung Wakil Rakyat ditahan oleh pasukan Pengendali Massa (Dalmas) Polda Metro Jaya dan Brimob. Setelah diadakan negosiasi disepakati, bahwa mahasiswa tidak melanjutkan perjalanan menuju ke Gedung DPR/MPR, tetapi di ijin melanjutkan aksi mimbar bebas di depan Kantor Walikota Jakarta Barat.

Setelah batas waktu yang disepakati habis, Kapolres dan Komandan Kodim Jakarta Barat menyarankan agar mahasiswa kembali ke kampus. Pada saat sebagian besar mahasiswa sudah berada di halaman kampus ada pasukan yang menembakan gas air mata ke barisan mahasiswa. Di tengah kepanikan mahasiswa terjadi penembakan yang menyebabkan 4 (empat) orang mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka.



Mahasiswa Universitas Trisakti yang meninggal adalah : Elang Mulia dari Fakultas Teknik Arsitektur-Angkatan 1996, Hendriawan Lesmana dari Fakultas Ekonomi-Angkatan 1996, Heri Hartono dari Fakultas Teknik Mesin Angkatan 1995 dan Jafidin Royan dari Fakultas Teknik Sipil Angkatan 1996. Peristiwa meninggalnya mahasiswa Universitas Trisakti itu menimbulkan reaksi keras masyarakat dari Dalam maupun Luar Negeri. Protes keras berupa tuntutan pertanggung jawaban Pemerintah atas Insiden tersebut. Menanggapi insiden di Trisakti, Menhakam/Pangab memerintahkan Komandan Pusat Militer (Puspom) ABRI Mayor Jenderal Samsu D, SH. Membentuk Tim untuk mencari oknum yang menembak mahasiswa. Tim yang diketuai Komandan Polisi Militer Jakarta, Kolonel CPM *Hendardjie*.

Selain Tim tersebut, Mabes Polri juga membentuk Tim tersendiri untuk menyelidiki secara intern petugas-petugas kepolisian dilapangan maupun senjata yang mereka gunakan. Tim ini diketuai oleh Kolonel Polisi Agung Antara, Inspektur Kepolisian Daerah (Irpolda) Metro Jaya dibantu Perwira dari Direktorat Intelpam Polri dan Korps Reserse Polri. Sehubungan dengan insiden Trisakti, 2 (dua) orang Anggota Polri, Letnan Satu Polisi Agus Triharyanto, Komandan Kompi II Batalyon B Resimen I Brimob dan Letnan Dua Polisi Pariyo, Komandan Pleton III Kompi II Batalyon B Resimen I Brimob diajukan ke Pengadilan Militer. Persidangan dipimpin Majelis Hakim Kolonel CHK Sudji Suradi, Letnan Kolonel CHK Payoman Pangaribuan dan Letnan Kolonel CHK Sarman Mulyono.

Dengan Oditur Militer Kolonel CHK Sadji Purwono dan Kapten Bambang Ari Wibowo. Tim Penasehat Hukum tersangka adalah : Adnan Buyung Nasution, Otto Hasibuan, Denny Kaliambang, Rudi Lontoh, Hotman Paris Hutapea, Muhammad Asegaf Kolonel Polisi K. Abdul Salam, Kolonel Polisi M Moenir dan Letnan Kolonel Polisi Soeseno. Persidangan terhadap tersangka Insiden Trisakti dimulai pada tanggal 6 Juni 1998 di Mahkamah Militer II – 08 Jakarta. Setelah beberapa kali persidangan, pada tanggal 12 Agustus 1998 Majelis Hakim Militer II – 08 Jakarta menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan terhadap Letnan Satu Polisi Agus Tri Heryanto dan 4 (empat) bulan terhadap Letnan Dua Polisi Pariyo, karena dinyatakan bersalah tidak mentaati perintah dinas dan melampaui kewenangan dinas saat menangani unjuk rasa mahasiswa Trisakti. Mereka bukan dipersalahkan sebagai pelaku penembakan mahasiswa karena tidak terbukti membawa peluru yang menewaskan mahasiswa dari senjata milik Polri.

Sejak bergulirnya Reformasi di Indonesia, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya Pemerintah Orde Baru, diganti oleh Pemerintahan Reformasi, yaitu adanya kebebasan Pers, Hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Selain itu ABRI mendapat banyak hujatan terhadap berbagai kebijaksanaan yang dilakukan pada Masa Orde Baru, seperti masalah Dwi Fungsi ABRI, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, masalah Tanjung Priok, masalah Lampung dan lain-lain.

Di tengah maraknya tuntutan masyarakat di Era Reformasi, kalangan masyarakat juga menghendaki dipisahkannya Polri dari ABRI dengan harapan agar Polri menjadi Lembaga yang Profesional dan Mandiri, jauh dari intervensi dalam menegakan Hukum. Gagasan pemisahan Polri dari ABRI bukanlah hal yang baru, sebelumnya banyak para Pakar Hukum dan Ilmuwan Kepolisian telah membahas melalui seminar-seminar, antara lain ; Prof. Dr. J.E. Sahetapy, Prof. Satjipto Raharjo, Prof. Dr. Awaloedin Djamin dan lain-lain. Secara umum mereka berpendapat bahwa Tugas Polisi berbeda dengan Tugas Militer. Tugas Militer adalah untuk mengamankan Negara dari ancaman musuh. Di dalam pelaksanaan tugasnya dapat menghancurkan dan membunuh musuh dengan kekerasan, demi komando dapat melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Sedangkan aparat Kepolisian bertugas mengamankan masyarakat agar tercipta ketertiban dan rasa aman. Dalam tugasnya, Polisi menindak para pelanggar dan menangkap penjahat harus berpedoman kepada Hukum dengan tidak mengesampingkan HAM dan tanpa kekerasan.

Dalam menyikapi tuntutan masyarakat dan dalam rangka Reformasi Intern di lingkungan ABRI, Menhankam/Pangab Jenederal TNI Wiranto menyatakan bahwa pemisahan Polisi dari tubuh ABRI menuju kemandirian Polri akan dilaksanakan secara bertahap meliputi ; perubahan struktur organisasi, piranti lunak dan lain-lain.

Sejak tanggal 1 April 1999, Polri yang tadinya dibawah ABRI, ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam). Sebutan ABRI diganti menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Acara serah terima dilaksanakan di Mabes ABRI Cilangkap ditandai dengan Penyerahan Panji-panji Polri.

2. Sejarah Polri Pada Masa Polri Mandiri

Seiring dengan bergulirnya Reformasi, Polri pun mulai membenahi diri dalam kinerjanya Polri dituntut untuk mandiri tonggak sejarah yang penting adalah memisahkan Polri dari ABRI. Landasan formal pemisahan tersebut adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 yang di tanda tangani oleh Presiden B.J. Habibie tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI “Polri Mandiri” merupakan konsekwensi logis dari reformasi tersebut. Pada tanggal 1 april 1999 penyerahan Panji-Panji Polri Tri Brata dari Kasum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sesjen Dephankam Letjen TNI fahrul Rahji diteruskan kepada Kaplori Jendral Polisi Drs. Roesmanhadi di Mabes ABRI Cilangkap. Kemudian secara resmi Polri pisah dari ABRI dan menjadi lembaga yang mandiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 89/2000 tanggal 1 Juli 2000. Bertepatan dengan hari Bhayangkara yang ke 57 pimpinan Polri dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Dai Bchktiar, yang pengangkatannya mendapatkan persetujuan DPR melalui fit and propertest dan pelantikannya langsung oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Sukarno Putri. Pada masa kepemimpinannya lahir Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Polisi sipil yang mandiri langsung dibawah Presiden Republik Indonesia.

Polisi Sipil adalah Polisi yang berwatak sipil, yaitu Polisi yang dalam perpolisiannya menggunakan dimensi moral dengan mempertimbangkan harkat dan martabat manusia. Jadi tugas Polisi bukan semata-mata sebagai penegak hukum tapi lebih diutamakan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

a. Perjuangan Polri dalam memberantas Terorisme

Meskipun sudah terjadi ratusan peristiwa pengeboman di Indonesia yang khususnya marak sejak tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia belum menyadari akan adanya aktivitas terorisme di Indonesia. Kasus pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah membuka mata pemerintah Indonesia dan dunia pada umumnya bahwa di Indonesia benar-benar telah terjadi aktivitas terorisme yang sangat serius. Perundang-undangan pemberantasan terorisme pun segera dibuat dan disyahkan bahkan diberlakukan secara surut untuk dapat menjerat para pelaku pidana terorisme yang

	<p>telah terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Selain memberlakukan undang-undang terorisme, pemerintah juga membuat naskah kerjasama dibidang kepolisian dan inteligen dengan Negara-negara didunia.</p> <p>Untuk dapat mengungkap segera kasus bom bali tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas yang anggota-anggotanya terdiri dari polisi-polisi pilihan dari seluruh Indonesia. Tugas pokok satuan tugas yang baru dibentuk tersebut adalah untuk segera mengungkap kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia serta menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris dibelakangnya.</p> <p>Selain tugas-tugas di atas, satuan tugas ini juga melaksanakan kerjasama internasional dibidang kepolisian dan inteligen dengan kepolisian negara-negara lain sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/30/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003, direktorat VI anti terror divalidasi dan diberi nama baru menjadi detasemen khusus 88 / Anti teror.</p> <p>Dengan adanya detasemen khusus 88/Anti teror bersama-sama dengan satuan tugas bom mengadakan operasi terus menerus sepanjang tahun untuk menangkap para pelaku, membongkar jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia. Dimulai dari pemeriksaan tempat kejadian pada pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002 sehingga ditemukan bahan dan jenis bom yang dipakai untuk pengeboman, identifikasi para korban, identitas kendaraan bermotor yang dipakai untuk pengeboman dan identitas pelaku bom bunuh diri.</p> <p>Melalui identitas kendaraan bermotor yaitu mobil Mitsubishi Colt L-300 dapat diketahui pemilik akhir kendaraan tersebut, meskipun sudah berpidah tangan sampai pemilik ke tujuh yaitu AMROZI.</p> <p>Setelah AMROZI tertangkap dan diinterogasi, maka dapat dibongkar para pelaku pengeboman di Bali dan jaringannya. Maka berikutnya dengan waktu yang relatif singkat dapat ditangkap IMAM SAMUDERA dan kelompoknya di daerah Banten, MUKHLAS alias ALI GHUFRON dan kelompoknya di daerah Surakarta dan ALI IMRON dan kelompoknya di daerah Kalimantan Timur. Operasi khusus dilanjutkan dengan pengejaran di pulau Sumatera dan berhasil menangkap MOHAMMAD RAIS dan kelompoknya. Berdasarkan keterangan kelompok MOHAMMAD RAIS inilah dapat diketahui keterlibatan DR AZAHARI dan NOORDIN M TOP pada pengeboman di Bali tahun 2002.</p> <p>Dengan keberadaan Direktorat VI Anti Teror, bersama-sama</p>
--	--

	<p>Satuan Tugas Bom dibuat operasi Khusus dengan sandi “Operasi Tulip”, dilakukan pengejaran kepada kelompok DR AZAHARI dan NOORDIN M TOP di pulau Sumatera. Operasi represif ini berhasil menangkap TONI TOGAR dan kelompoknya di daerah Riau dan Medan yang juga melakukan kegiatan serangkaian perampokan nasabah bank untuk mencari dana bagi kepentingan operasi teror, termasuk diantaranya adalah IDRIS alias GEMBROT pelaku pengeboman di Bali.</p> <p>Dari hasil pelacakan diketahui bahwa DR AZAHARI dan kelompoknya telah menyeberang di Jakarta. Untuk melakukan pengejaran dilakukan operasi preventif dengan cara melacak segala jejak perjalanan DR AZAHARI dan NOORDIN M TOP sejak berangkat ke Indonesia dari Malaysia. Operasi preventif ini diberi sandi “Operasi Safar Sofi” dan berhasil menangkap kelompok-kelompok teroris yang akan melakukan kegiatan terorisme di Indonesia seperti kelompok MUSTAFA alias ABU THOLUD dengan unit khos-nya yang sudah merencanakan kegiatan teror di Semarang dan berhasil ditemukan sejumlah senjata api, bahan-bahan bom dalam skala besar, peluru dan dokumen-dokumen perencanaan teror. Selain itu juga berhasil ditangkap kelompok QITAL alias ADI SURYANA bersama barang bukti berupa bahan-bahan bom di daerah Surakarta, kelompok ini juga telah merencanakan serangkaian kegiatan teror.</p> <p>Direktorat VI Anti Teror dilikuidasi dan diganti namanya menjadi Detasemen Khusus 88 / Anti Teror. Operasi khusus terus dilanjutkan, sementara pengeboman juga terus terjadi dan belakangan diketahui dilakukan oleh kelompok lain seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). GAM melakukan serangkaian pengeboman seperti gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bandara Soekarno Hatta dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kantor Walikota, saluran pipa minyak dan salah satu Mall di Medan. Sedangkan kelompok NII sedang merakit bom dan meledak belum waktunya di daerah Cimanggis Bogor. Dengan beberapa kejadian tersebut maka operasi dilanjutkan dengan operasi represif yang diberi sandi “Operasi Safar Sofi 2”, dan dalam waktu singkat berhasil menangkap para pelakunya.</p> <p>Pengeboman di Hotel JW Marriott tanggal 5 Agustus 2003 dapat segera diungkap oleh Detasemen Khusus 88 / Anti Teror melalui kegiatan investigasi yang secara cepat dapat diungkap jenis bom yang dipakai, identitas kendaraan dan identitas pelaku bom bunuh diri yang kepalanya terlempar sampai dengan kamar hotel lantai lima melalui pemeriksaan DNA.</p>
--	--

	<p>Dalam waktu dua bulan setelah peledakan, di Cirebon telah berhasil ditangkap para pelaku pengeboman yaitu MASRIZAL alias TOHIR dan ISMAIL. Sayangnya dalam penggerebegan di Bandung, AZAHARI dan NOORDIN M. TOP berhasil lolos karena peristiwa penangkapan di Cirebon telah diberitakan oleh media televisi.</p> <p>Operasi Khusus Kepolisian oleh Detasemen Khusus 88 / Anti Teror terus dilakukan untuk melakukan pengejaran terhadap AZAHARI dan NOORDIN M. TOP. Dalam operasi ini telah berhasil ditangkap sejumlah orang yang membantu pelarian kedua buronan seperti menyediakan tempat tinggal, membantu transportasi, membantu survey untuk target teror dan juga berhasil menggagalkan rencana pengeboman Akademi Kepolisian pada saat hari Bhayangkara tahun 2004.</p> <p>Karena gagal melakukan pengeboman di Akademi Kepolisian, sasaran pengeboman dialihkan ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004. Melalui operasi khusus kepolisian yang efektif, dalam waktu satu bulan sebagian besar para pelakunya berhasil ditangkap di daerah Bogor. Para pelaku yang berhasil ditangkap ini antara lain ROIS alias IWAN DARMAWAN, Ustadz IRUN, AGUS JUNAEDI, APUY, HASAN dan SOGHIR.</p> <p>Dalam operasi pengeboman ini AZAHARI dan NOORDIN M.TOP telah berkolaborasi dengan orang-orang anggota NII (Negara Islam Indonesia). AZAHARI dan NOORDIN M. TOP belum berhasil ditangkap karena mereka berpisah dengan kelompok yang berhasil ditangkap.</p> <p>Operasi pengejaran terus dilakukan dan dapat ditangkap kelompok "KOMPAK" di bawah pimpinan ABDULLAH SUNATA baik di Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Jawa Timur yang telah berkolaborasi dan membantu pelarian kedua buron utama teroris di Indonesia. Namun sekali lagi ZAHARI dan NOORDIN M.TOP berhasil melakukan pengeboman di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005. Pengeboman kali ini dilakukan dengan merubah taktik yaitu dengan tidak lagi memakai bom mobil yang mudah dilacak oleh polisi, akan tetapi memakai bom ransel di tiga tempat secara bersamaan. Setelah melalui kegiatan investigasi yang tidak kenal lelah, pada hari ke 40 AZAHARI tewas dalam operasi penggerebegan di Batu Malang pada tanggal 9 Nopember 2005. Atas keberhasilan penangkapan AZAHARI yang bersamaan waktunya dengan sejumlah penangkapan kelompok SUBUR alias ABU MUJAHID di Semarang, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri diberi julukan "<i>the best human intelligent in the world</i>" oleh harian <i>Morning Herald</i> yang</p>
--	--

	<p>diterbitkan di New York pada bulan Nopember tahun 2005.</p> <p>Pada tanggal 7 Agustus tahun 2009 Densus 88 melakukan Pengerebekan sarang teroris dan penangkapan Ibrohim. Penggerebekan yang berujung kematian Ibrohim ternyata diawali dari penangkapan terhadap Mohzahri dan dua keponakannya yakni Arif usia 38 dan hendra usia 34 tahun Jumat petang tanggal 7 Agustus tahun 2009 sore ketika itu Mohzari baru pulang dari sawah Jumat petang hingga malam dan berlanjut pada sabtu pagi inilah Polisi terus mengepung dan berkali-kali meledakkan bom serta menghujani rumah Mohzari dengan rentetan tembakan, sampai akhirnya Ibrohim itu benar-benar tewas ini diketahui pada saat jenazah dikeluarkan dari rumah tersebut sekitar pukul 11.45 wib. Pada tanggal 17 September 2009 Noordin.M. Top akhirnya tewas dalam penyeragaman di kampung kepuh sari kelurahan mojo songo, jebres, Surakarta bersama-sama dengan tiga orang lain yang bernama Aryo Sudarso, Adi Susilo dan Bagus Budi pranoto (Urwah).</p> <p>Semua kasus terorisme di Indonesia telah berhasil diungkap oleh Densus 88 AT Bareskrim Polri, kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penangkapan kelompok jaringan terorisme yang masih beroperasi di luar, dengan melakukan penangkapan kelompok Palembang pada pertengahan Tahun 2008 dimana disita 36 buah Bom rakitan yang siap ledak dan direncanakan akan diledakkan di Bukit Tinggi Sumbar. Penangkapan tersangka saat terbakarnya tangki minyak di Plumpang Jakarta akhir 2008. Penangkapan tersangka buronan Singapore di Jawa Tengah pada pertengahan Tahun 2009. Penangkapan tersangka perampokan. Penangkapan beberapa tersangka terkait dengan peledakan Bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009, dengan pelaku Bom Bunuh diri bernama DANI SETIAWAN dan NANA, dan pelaku yang ikut merancang ledakan bernama IBROHIM (orang dalam hotel yang memfasilitasi masuknya bahan peledak ke dalam Hotel) meninggal dunia saat dilakukan penangkapan di tempat persembunyian mereka di Temanggung Jawa Tengah. <p>Tersangka teroris Dul Matin yang sudah lama menjadi DPO pihak berwajib tewas diterjang peluru pasukan Densus 88/Antiteror Mabes Polri dalam penggerebekan di ruko Multiplus Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada</p>
--	---

	<p>bulan Pebruari 2010. Dulmatin alias Joko Pitono berasal dari Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini Polri dibantu oleh TNI sedang melaksanakan operasi Tinong bala yang dimulai sejak 10 Januari 2016 dan melibatkan sekitar 2000 personel gabungan TNI Polri dan berakhir 10 Maret 2016 dalam upaya untuk melumpuhkan kelompok santoso yang bergerliya dihutan pegunungan Poso. Operasi ini di perpanjang lagi samapai dengan 8 Mei 2016 dan akhirnya berhasil dilumpuhkan pada tanggal 19 juli 2016. Walaupun banyak lagi kasus-kasus yang muncul dengan pola yang hampir sama seperti munculnya anggota gerakan MIT yang dipimpin oleh Ali Kalora yang masi membutuhkan pengamanan dan pengawasan dari Polri kususnya satuan Densus 88 dengan operasi Tinombala khususnya Polda Sulteng masih tetap melaksanakan pengejaran sampai ada keputusan penghentian dari pemerintah dan Polri khususnya Densus 88 tetap melaksanakan tugasnya melalui kegiatan Intelijen untuk mencari, menangkap, mengungkap dan memutus jaringan teroris yang ada di Indonesia.</p> <p>b. Perjuangan Polri dalam memberantas kejahatan dunia maya (siber)</p> <p>Perkembangan kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Sedangkan faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya kejahatan siber karena adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, smartphone, gadget dan lain-lain dengan berbagai pilihan merk dan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses internet menggunakan alat teknologi tersebut. Dengan kemudahan mengakses internet tersebut namun tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang kejahatan siber justru membuat masyarakat menjadi sasaran yang empuk bagi pelaku kejahatan siber tersebut.</p> <p>c. Pimpinan Polri dari masa ke masa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Periode 1945-1959 dijabat oleh : Jenderal Polisi R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. 2) Periode 1959-1963 dijabat oleh : Jenderal Polisi R. Soekarno Djojonagoro. 3) Periode 1963-1965 dijabat oleh : Jenderal Polisi R. Soetjipto Danoe Koesoemo. 4) Periode 1965-1968 dijabat oleh : Jenderal Polisi R. Soetjipto Joedodihadjo. 5) Periode 1968-1971 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs.
--	---

	<p>Hoegeng Imam Santoso.</p> <p>6) Periode 1971-1974 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Mohammad Hasan.</p> <p>7) Periode 1974-1978 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo.</p> <p>8) Periode 1978-1982 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Awaloedin Djamin, MPA.</p> <p>9) Periode 1982-1986 dijabat oleh : Jenderal Polisi Anton Soejarwo.</p> <p>10) Periode 1986-1991 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi.</p> <p>11) Periode 1991-1993 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Kunarto.</p> <p>12) Periode 1993-1996 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Banurusman Astrosemitro.</p> <p>13) Periode 1996-1998 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo.</p> <p>14) Periode 1998-14 Januari 2000 dijabat oleh : Jenderal Polisi Drs. Roesman Hadi, SH.</p> <p>15) Periode 14 Januari 2000 oleh ; Jenderal Polisi Drs. K.P.H. Rusdiharjo.</p> <p>16) Periode 2001-2002 dijabat oleh ; Jenderal Polisi Drs. Suroyo Bimantoro</p> <p>17) Periode 2002-2005 dijabat oleh ; Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar.</p> <p>18) Periode 2005-2008 dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto.</p> <p>19) Periode 2008 - 2010 dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri.</p> <p>20) Periode 2010 - 2013 dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo.</p> <p>21) Periode 2013 – 2015 dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Sutarman.</p> <p>22) Periode 2015 - 2016 dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti;</p> <p>23) Periode 2016 – 2019 dijabat oleh Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.</p> <p>24) Periode 2019 - 2021 dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.</p>
--	---

25) Periode 2021 dijabat Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sampai sekarang

Nilai-nilai kejuangan sejarah Polri pada masa era reformasi dan Polri mandiri :

- 1) Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melanggar prosedur dan melampaui batas kewenangannya.
- 2) Tuntutan masyarakat agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri tidak ada Intervensi dari pihak manapun dalam penegakan hukum.

3. Pemekaran Polda dan Polres

Pemekaran Daerah/wilayah merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat tertentu untuk memisahkan diri dari daerah induknya, kemudian membentuk suatu daerah baru baik itu Propinsi, Kabupaten atau Kota dengan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Pembentukan daerah otonom baru harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi daerah otonom yang mandiri dan maju, bukan hanya didasarkan atas keinginan sesaat. Pembentukan daerah otonom baru selain mengacu pada peraturan perundangan yang ada, juga harus secara obyektif melihat potensi dan kemampuan daerah tersebut untuk bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju. Daerah otonom harus tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan tidak jarang terjadi kekisruhan di daerah-daerah yang dimekarkan akibat perebutan kekuasaan politik. Kenyataan itu menjadi sangat kontras dengan tujuan pemekaran (otonomi daerah) yang sebenarnya. Pemekaran daerah bertujuan utama agar ada ruang partisipasi bagi politik daerah serta masuknya uang dari pusat ke daerah. Namun, untuk melakukan pemekaran pada suatu daerah harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran tentang masalah yang harus dihadapi setelah pemekaran. Sebab, pemekaran daerah tidaklah mudah dan

murah. Pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi, bukannya justru menambah masalah atau menciptakan masalah baru. Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom, atau sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak sistem pemerintahan sentralistis pada masa orde Baru, pemerintah juga telah banyak melakukan pembentukan daerah otonom baru. Kecamatan-kecamatan yang semakin kuat karakter *urban-nya* kemudian dijadikan kota administratif, sebuah unit pemerintahan wilayah dekonsentrasi (*field administration*). Selanjutnya apabila karakter tersebut telah semakin menguat, daerah tersebut dijadikan Kota Madya yang setingkat dengan Pemerintahan Kabupaten.

Seiring dengan adanya pemekaran wilayah untuk menjaga kamtibmas maka diikuti dengan pemekaran Polda maupun Polres sebagai pelaksana harkamtibmas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

a. Pemekaran Polda

Kepolisian Daerah biasa disingkat Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).


Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri (Sepolwan Lemdiklat).

Ada tiga tipe Polda, yakni:

- 1) Tipe A-K (A+);
- 2) Tipe A.

Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen).

b. Berikut polda dengan logo, tipe dan letak makonya:

No	Nama	Logo	Wilayah Hukum	Markas	Tipe
1.	Kepolisian Daerah Aceh		Aceh	Banda Aceh	A
2.	Kepolisian Daerah Sumatra Utara		Sumatra Utara	Medan	A
3.	Kepolisian Daerah Sumatra Barat		Sumatra Barat	Padang	A
4.	Kepolisian Daerah Riau		Riau	Pekanbaru	A
5.	Kepolisian Daerah Kepulauan Riau		Kepulauan Riau	Batam	A
6.	Kepolisian Daerah Jambi		Jambi	Jambi	A
7.	Kepolisian Daerah Bengkulu		Bengkulu	Bengkulu	A
8.	Kepolisian Daerah Sumatra Selatan		Sumatra Selatan	Palembang	A
9.	Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung		Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	A
10.	Kepolisian Daerah Lampung		Lampung	Bandar Lampung	A
11.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya		DKI Jakarta	Jakarta Selatan	A-K (A+)
12.	Kepolisian Daerah Banten		Banten tanpa Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Serang	A
13.	Kepolisian Daerah Jawa Barat		Jawa Barat tanpa Depok, dan Bekasi	Bandung	A
14.	Kepolisian Daerah Jawa Tengah		Jawa Tengah	Semarang	A
15.	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta		DI Yogyakarta	Sleman	A
16.	Kepolisian Daerah Jawa Timur		Jawa Timur	Surabaya	A
17.	Kepolisian Daerah Bali		Bali	Denpasar	A
18.	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat	Mataram	A
19.	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		Nusa Tenggara Timur	Kupang	A
20.	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat		Kalimantan Barat	Pontianak	A
21.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah		Kalimantan Tengah	Palangkaraya	A
22.	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan		Kalimantan Selatan	Banjarmaru	A
23.	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur		Kalimantan Timur	Balikpapan	A
24.	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara		Kalimantan Utara	Tanjung Selor	A
25.	Kepolisian Daerah Sulawesi Utara		Sulawesi Utara	Manado	A
26.	Kepolisian Daerah Gorontalo		Gorontalo	Gorontalo	A
27.	Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah		Sulawesi Tengah	Palu	A
28.	Kepolisian Daerah Sulawesi Barat		Sulawesi Barat	Mamuju	A

28.	Kepolisian Daerah Sulawesi Barat		Sulawesi Barat	Mamuju	A
29.	Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan		Sulawesi Selatan	Makassar	A
30.	Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara		Sulawesi Tenggara	Kendari	A
31.	Kepolisian Daerah Maluku Utara		Maluku Utara	Ternate	A
32.	Kepolisian Daerah Maluku		Maluku	Ambon	A
33.	Kepolisian Daerah Papua Barat		Papua Barat	Manokwari	A
34.	Kepolisian Daerah Papua		Papua	Jayapura	A

Dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus mampu bersikap adil dan merata .

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang merata dan adil perlu melihat kondisi geografis dari masing-masing wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan, maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pemekaran suatu wilayah hukum guna terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Maka dari itu dengan adanya pemekaran wilayah diikuti oleh pemekaran wilayah hukum/Polda sebagai fungsi memelihara kamtibmas.

- c. Beberapa Polda yang melakukan pemekaran, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Polda Kalimantan Utara dari Polda Kalimantan Timur;
 - 2) Polda Gorontalo dari Polda Sulawesi Utara;
 - 3) Polda Maluku Utara dari Polda Maluku;
 - 4) Polda Papua Barat dari Polda Papua;
- d. Bahkan putra daerah pernah berkesempatan mendapat tanggungjawab sebagai Kapolda di tanah kelahirannya, seperti contoh:
 - 1) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. Kapolda Metro Jaya;
 - 2) Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M. Kapolda Sulut;
 - 3) Irjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si. Kapolda Jawa Barat;
 - 4) Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. Kapolda Bali;
 - 5) Irjen Pol Drs. Paulus Waterpau Kapolda Papua.
 - 6) Irjen Pol MD. Fakhiri, S.I.K Kapolda Papua (2021).

	<p>e. Pemekaran Polres Dengan adanya pemekaran wilayah Polda maka diikuti dengan adanya pemekaran wilayah dibawahnya, yaitu Polres dan Polsek. Berikut Polres yang mengalami pemekaran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Polres Tangerang Selatan dari Polres Tangerang kota di Polda Metro Jaya; 2) Polres Malaka dari Polres Belu di Polda NTT; 3) Polres Manggarai Timur dari Polres Manggarai di Polda NTT; 4) Polres Nagekeo dari Polres Ngada di Polda NTT; 5) Polres Sabu Raijua dari Polres Kupang di Polda NTT; 6) Polres Sumba Barat Daya dari Polres Sumba Barat di Polda NTT. 7) Pemekaran Polres di Polda Lainnya. <p>4. Hubungan Polri terhadap TNI dan Pemda dalam membangun Bangsa</p> <p>Sinergitas antar instansi pemerintah harus selalu di upayakan, demi persatuan dan kesatuan serta solidaritas dalam rangka membangun bangsa ini, Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kebersamaan dan kekompakkan serta menanamkan kerja sama antar instansi. Yang paling penting kegiatan ini untuk meningkatkan jiwa korsa sehingga rasa persatuan dan kesatuan tetap terjaga.</p> <p>a. Hubungan Polri terhadap TNI</p> <p>Hubungan harmonis yang selama ini telah terbina dengan baik membuktikan bahwa TNI dan Polri mampu mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah ini, sehingga bersama Pemda dan Komponen Masyarakat lainnya mampu menciptakan kedamaian dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan di daerah.</p> <p>Dalam perspektif tujuan Nasional, keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Nasional sangat lekat hubungannya dengan stabilitas keamanan Nasional. Sedangkan inti dari stabilitas keamanan Nasional adalah profesionalisme TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Dalam hal ini, sinergitas berupa kesatuan persepsi, keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembangunan kerjasama antar institusi TNI dan Polri untuk meningkatkan profesionalisme sebagai dasar mantapnya stabilitas keamanan Nasional. Peningkatan profesionalisme melalui</p>
--	---


	<p>implementasi sinergitas TNI dan Polri untuk memantapkan stabilitas keamanan Nasional akan memberikan kontribusi dalam keterpaduan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya, terutama dalam penyelenggaraan operasional di satuan.</p> <p>TNI dan Polri harus dapat membangun rasa saling menghargai dan menghormati secara organisasi maupun individu sebagai langkah menuju sinergitas TNI dan Polri dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan Nasional.</p> <p>b. Hubungan Polri terhadap Pemerintah Daerah (Pemda)</p> <p>Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban. Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemerintah Daerah. Akan tetapi, Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Polri ke Polda. Bentuk kerjasama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2018, volume 4 nomor 1 20 hubungan antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban masyarakat Satriya Nugraha 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait kewajiban kewajiban Kepala daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dimana tugas pokok Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi kepala daerah untuk menjalankannya</p>
--	--



RANGKUMAN

1. Sejarah Polri Pada Masa Penanganan Peristiwa Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, Mahasiswa Trisakti mengadakan aksi mimbar bebas di halaman kampusnya. Mimbar bebas yang dihadiri ribuan mahasiswa berjalan baik dan damai. Setelah batas waktu yang disepakati habis, Kapolres dan Komandan Kodim Jakarta Barat menyarankan agar mahasiswa kembali ke kampus. Pada saat sebagian besar mahasiswa sudah berada di halaman kampus ada pasukan yang menembakan gas air mata ke barisan mahasiswa. Di tengah kepanikan mahasiswa terjadi penembakan yang menyebabkan 4 (empat) orang mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka.
2. Sejarah Polri Pada Masa Polri Pisah Dari ABRI, Dalam menyikapi tuntutan masyarakat dan dalam rangka Reformasi Intern di lingkungan ABRI, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa pemisahan Polisi dari tubuh ABRI menuju kemandirian Polri.
3. Sejarah Polri Mandiri, Landasan formal pemisahan tersebut adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI "Polri Mandiri" merupakan konsekuensi logis dari reformasi tersebut.
4. Perjuangan Polri memberantas terorisme, Dengan adanya detasemen khusus 88/Anti teror bersama-sama dengan satuan tugas bom mengadakan operasi terus menerus sepanjang tahun untuk menangkap para pelaku, membongkar jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia.
5. Pemekaran Polda dan Polres
 Pemekaran Polda
 Kepolisian Daerah biasa disingkat Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri.
 Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri (Sepolwan Lemdiklat). Bahkan putra daerah pernah berkesempatan mendapat tanggungjawab sebagai Kapolda.
6. Hubungan Polri terhadap TNI dan Pemda membangun Bangsa
 Sinergitas antar instansi pemerintah harus selalu di upayakan,

	<p>demi persatuan dan kesatuan serta solidaritas dalam rangka membangun bangsa ini, Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kebersamaan dan kekompakkan serta menanamkan kerja sama antar instansi. Yang paling penting kegiatan ini untuk meningkatkan jiwa korsa sehingga rasa persatuan dan kesatuan tetap terjaga.</p> <p>a. Hubungan Polri terhadap TNI</p> <p>Hubungan harmonis yang selama ini telah terbina dengan baik membuktikan bahwa TNI dan Polri mampu mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah ini, sehingga bersama Pemda dan Komponen Masyarakat lainnya mampu menciptakan kedamaian dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan di daerah</p> <p>b. Hubungan Polri terhadap Pemerintah Daerah (Pemda)</p> <p>Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban</p>
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan sejarah Polri pada masa era reformasi! 2. Jelaskan sejarah Polri pada masa Polri mandiri! 3. Jelaskan Pemekaran Polda dan Polres! 4. Jelaskan Hubungan Polri terhadap TNI dan Pemda membangun Bangsa!